

SKRIPSI NIA AGUSTINA 2026 (bab 1-5).pdf

by FAI 28

Submission date: 05-Aug-2026 01:54PM (UTC+0700)

Submission ID: 3008386924

File name: SKRIPSI_NIA_AGUSTINA_2026_bab_1-5_.pdf (2.87M)

Word count: 18393

Character count: 120398

**PENGARUH ²CAPITAL INTENSITY DAN *TRANSFER PRICING*
TERHADAP TAX ³VOIDANCE DENGAN *CORPORATE*
GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI
PADA PERUSAHAAN *BASIC MATERIALS* YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S1)
Program Studi Akuntansi Fakultas ⁷Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Indragiri



OLEH :

NIA AGUSTINA
NIM. 102221010001

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
TEMBILAHAN

2026

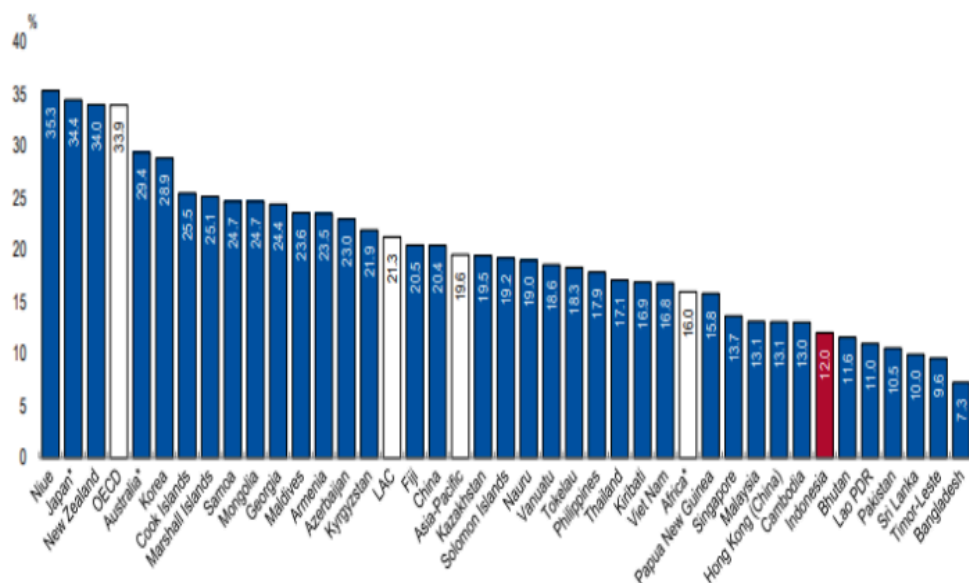
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang masih berada dalam tahap pengembangan, menghadapi berbagai tantangan sekaligus peluang dalam mengembangkan sistem perpajakannya. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling dominan karena memberikan kontribusi terbesar dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) dibandingkan dengan jenis penerimaan lainnya (Pramita & Susanti, 2023). Dengan jumlah penduduk yang besar serta dinamika pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, penerimaan pajak menjadi salah satu fondasi utama dalam menunjang pembangunan nasional (Siregar & Setyawati, 2025). Melalui penerimaan pajak, pemerintah memperoleh sumber dana yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Salsabila & Machdar, 2025).

Pajak menjadi peran krusial bagi negara, namun kemampuan Indonesia dalam menghimpun penerimaan pajak masih tergolong rendah. Menurut OECD (2025), berdasarkan data pada laporan *Revenue Statistics in Asia and Pacific* 2025 grafik rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan bahwa Indonesia masih berada pada posisi rendah dalam menghimpun pajak dengan rasio pajak sekitar 12% pada tahun 2023, jauh tertinggal dari rata-rata Asia Pasifik

sebesar 19,5%. Rasio ini juga lebih rendah dari rata-rata ⁵ *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* yang tercatat sekitar 33,9%. Rendahnya tax ratio tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan negara dalam menghimpun penerimaan pajak belum optimal seperti negara lain di kawasan Asia Pasifik. Salah satu faktor yang menghambat ⁵ optimalisasi penerimaan pajak adalah masih adanya praktik penghindaran pajak oleh sejumlah wajib pajak badan sehingga potensi penerimaan pajak tidak sepenuhnya terealisasi.



56

Gambar 1.1 Tax-to-GDP ratio

Sumber: *Revenue Statistics in Asia Pacific 2025: Indonesia* (OECD, 2025)

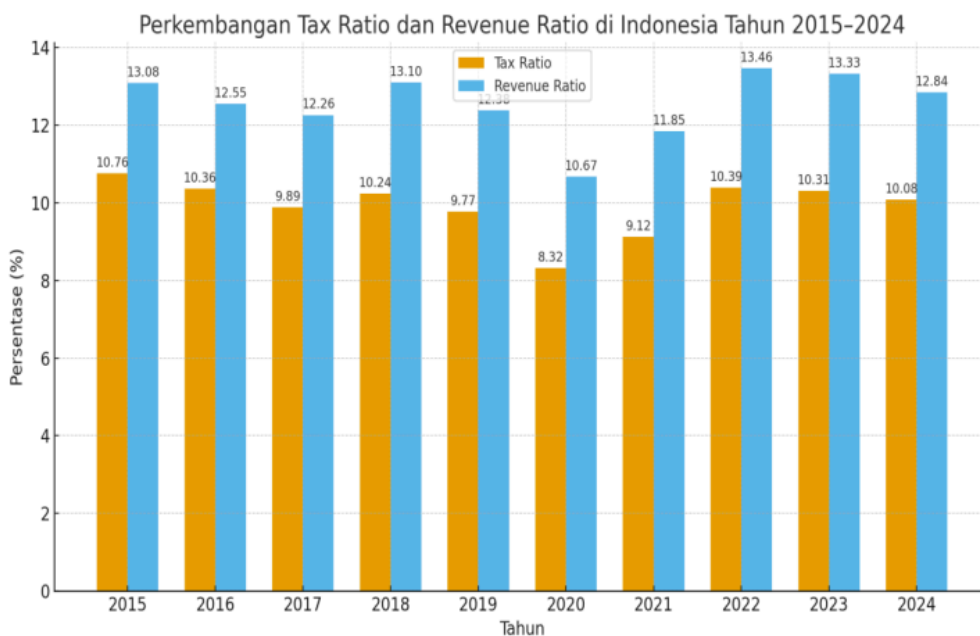
Menurut Shidqie (2024), OECD mengidentifikasi rendahnya rasio pajak Indonesia disebabkan oleh tingginya jumlah pekerja di sektor informal yang mencapai sekitar 60% dan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap pajak. Aktivitas ekonomi informal yang tidak tercatat menyebabkan banyak potensi pajak tidak masuk dalam basis perpajakan. Di sisi lain, administrasi dan regulasi perpajakan juga dinilai masih memiliki celah yang dimanfaatkan wajib pajak

untuk menekan beban pajak. Selain faktor struktural tersebut, Indonesia juga menghadapi persoalan lain yang turut menekan potensi penerimaan negara, yaitu meningkatnya praktik penghindaran pajak yang menyebabkan kerugian yang signifikan. Berdasarkan berita pada situs Direktorat Jendral Pajak yang ditulis oleh Faradina (2025), laporan *Tax justice Network* pada tahun 2023 menunjukkan bahwa negara diperkirakan mengalami kerugian sekitar USD 2.736,5 juta, setara Rp44 triliun akibat ² penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, serta sekitar Rp1 triliun dari aliran kekayaan ke luar negeri.

Sebagai ukuran kemampuan negara dalam menghimpun penerimaan pajak, fenomena tren *tax ratio* di Indonesia masih belum menunjukkan peningkatan yang konsisten. Berdasarkan data yang dilansir dari website Kemenkeu (2025) dalam laporan *Recent Macroeconomic and Fiscal Development*, *tax ratio* Indonesia pada tahun 2022 tercatat 10,39% kemudian ¹ mengalami penurunan sekitar 10,31% pada tahun 2023 dan kembali melemah sekitar 10,08% di tahun 2024. Tren penurunan ini mencerminkan bahwa kinerja penerimaan pajak Indonesia menunjukkan bahwa kapasitas negara dalam mengamankan penerimaan pajak belum optimal. Ketidakmampuan ⁸⁷ ini memberikan ruang bagi perusahaan untuk memanfaatkan celah regulasi guna menekan beban pajak, sehingga praktik penghindaran pajak memiliki peluang besar akan terjadi.

Kondisi ini sejalan dengan ³⁵ tantangan yang dihadapi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, berdasarkan pemberitaan pada website dari CNN Indonesia (2025) mencatat terdapat 200 wajib pajak melakukan penunggakan dengan nilai Rp50-60 triliun yang menjadi fokus penagihan oleh

kementrian keuangan. Fenomena ini semakin menegaskan bahwa hambatan terhadap optimalisasi penerimaan negara sumber dari berbagai bentuk ketidakpatuhan terhadap pajak, sehingga memanfaatkan celah regulasi untuk melakukan penghindaran pajak. Selain itu, pemerintah juga menetapkan PMK 136/2024 tentang pajak minimum global dengan tarif 15% bagi perusahaan multinasional sebagai upaya menutup celah praktik penghindaran pajak lintas negara dan memastikan kontribusi pajak yang lebih adil. Praktik penghindaran pajak bukan hanya menurunkan potensi penerimaan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana penghindaran pajak dapat terjadi baik melalui skema formal maupun kelalaian yang disengaja. Selain itu, kebijakan yang diterapkan ini menjadi langkah strategis yang dilakukan pemerintah untuk menekan praktik penghindaran pajak, sehingga potensi penerimaan yang hilang diharapkan dapat diminimalisasi.



Gambar 1.2 Perkembangan Tax Ratio dan Revenue Ratio Tahun 2015-2024
 Sumber: *Recent Macroeconomic and Fiscal Development* (Kemenkeu, 2025)

Menurut Setianto (2024), menyatakan bahwa perusahaan sektor *Basic Materials* terdiri atas beberapa perusahaan-perusahaan yang menyediakan produk maupun jasa yang dimanfaatkan industri lain ¹³⁵ sebagai input utama dalam proses produksi barang jadi. Sektor ini meliputi perusahaan yang bergerak dibidang bahan kimia, material konstruksi, wadah dan kemasan, pertambangan logam serta mineral nonenergi, hingga industri produk kayu dan kertas. Dalam pemberitaan yang dilansir dari situs Bisnis.com (2024) berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), terdapat lebih dari seratus emiten yang masuk dalam sektor ini, dan seluruhnya berperan besar dalam mendukung rantai pasok industri nasional. Hal ini menjadikan sektor *Basic Materials* memiliki skala operasi yang besar, penggunaan aset tetap yang tinggi, transaksi lintas negara, meliputi ekspor, impor, maupun transaksi antar entitas berelasi, serta ketergantungan pada sumber daya alam yang membuat sektor ini memiliki karakteristik yang kompleks, baik dalam kegiatan operasional maupun pengelolaan keuangannya, termasuk pemenuhan kewajiban perpajakan.

Kompleksitas tersebut tercermin dalam berbagai permasalahan perpajakan yang muncul di sektor *Basic Materials*, Salah satu kasus yang dilaporkan oleh Putri (2024) dalam berita Tempo.co yang dilakukan oleh PT Aneka Tambang (ANTM) pada tahun 2021, perusahaan milik negara yang bergerak di sektor bahan baku yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak melalui ⁷¹ impor emas dari Hong Kong dengan transit melalui Singapura. Modus yang digunakan adalah manipulasi kode HS pada dokumen impor, di mana emas setengah jadi yang seharusnya dikenai pajak diubah menjadi emas bongkahan yang tidak dikenakan

5
pajak. Praktik ini bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara, sehingga beban pajak perusahaan menjadi lebih ringan.

Dampak dari praktik penghindaran pajak ini tidak hanya mengurangi penerimaan negara, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan yang kompetitif antarperusahaan. Kasus antam 120 menunjukkan bahwa perusahaan di sektor *Basic Materials*, yang padat modal dan memiliki perdagangan internasional yang kompleks rentan terhadap penghindaran pajak seperti memanipulasi dokumen atau perubahan klasifikasi barang. Fenomena ini menekankan pentingnya pengawasan dan penegakan regulasi pajak yang lebih ketat agar praktik penghindaran pajak dapat diminimalkan dan penerimaan negara tetap optimal. Oleh karena itu, praktik penghindaran pajak tetap menjadi tantangan yang signifikan dalam sistem perpajakan Indonesia.

24
Kasus ini menunjukkan beban pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal tetapi juga karakter internal perusahaan. 3
Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, salah satunya adalah *capital intensity*, 14 menggambarkan seberapa besar porsi aset tetap yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total aset keseluruhan, yang menunjukkan tingkat investasi perusahaan pada aset berwujud (Firmansyah & Estutik, 2021). 88
Semakin besar intensitas modal suatu perusahaan, semakin besar pula peluang perusahaan dalam memanfaatkan depresiasi untuk 1 mengurangi laba kena pajak, sehingga berpotensi menekan kewajiban pajak. Perusahaan sektor *Basic Materials* yang memiliki intensitas aset tetap yang sangat besar, sebagaimana tingginya investasi pada bangunan, mesin, alat berat, serta fasilitas produksi jangka panjang memberikan

perusahaan ruang yang lebih luas dalam mengatur depresiasi aset maupun alokasi biaya lainnya sebagai strategi dalam menekan laba kena pajak (Kasir, 2023). Besarnya nilai aset tetap pada sektor ini mencerminkan sifat padat modal. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi struktur biaya dan risiko operasional perusahaan, tetapi juga membuka peluang tertentu dalam pengelolaan kewajiban pajak (Sulistyoningsih, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Hidayah & Ernandi (2022) mengungkapkan bahwa perusahaan dengan aset tetap yang besar dapat menekan beban pajaknya melalui pemanfaatan biaya depresiasi aset sebagai pengurang laba, sehingga laba kena pajak menjadi lebih kecil dan kewajiban pajak yang harus dibayar pun berkurang.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah *transfer pricing*. Menurut Marliana *et al.*, (2022), mengungkapkan bahwa *transfer pricing* merupakan penetapan harga atas transaksi antara dua entitas yang memiliki keterkaitan, baik dalam negeri maupun lintas negara. Praktik ini digunakan untuk mengatur nilai transaksi internal sesuai kepentingan manajerial. Praktik ini sering digunakan untuk memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak yang rendah, sehingga berpotensi mengurangi penerimaan pajak negara. Fenomena ini terlihat pada PT Aneka Tambang (ANTM) pada tahun 2021, ketika impor emas dari Hong Kong melalui Singapura diduga dilakukan dengan harga tertentu untuk mengurangi beban pajak. Kasus ini menunjukkan bagaimana struktur transaksi lintas negara dengan dimanfaatkan perusahaan padat modal untuk mengelola kewajiban pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh Apriani (2025) mengungkapkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat transaksi dengan pihak

berelasi yang lebih tinggi cenderung lebih berpotensi memanfaatkan celah regulasi untuk mengurangi kewajiban pajak.

¹² Salah satu faktor yang diyakini dapat mempengaruhi hubungan antara variabel-variabel tersebut ⁹ adalah *corporate governance*, sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar setiap tindakan manajer tetap sesuai dengan harapan pemilik. Melalui pengawasan ini, aktivitas perusahaan dapat berjalan lebih teratur dan selaras dengan tujuan utama perusahaan (Pramita & Susanti, 2023). Salah satu elemen penting dari *corporate governance* yang dapat mempengaruhi keputusan mengenai penghindaran pajak adalah efektivitas pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen dan pemegang saham utama (Marfiana & Andriyanto, 2021). Berdasarkan pemberitaan yang dilansir dari Kompas ditulis oleh Purnamasari (2024), menunjukkan bahwa kasus korupsi yang terjadi pada PT Timah Tbk dan kelemahan pengawasan internal di PT Aneka Tambang menunjukkan lemahnya pengawasan direksi dan komisaris serta konflik kepentingan dapat merugikan perusahaan dan negara. Fenomena ini tidak hanya meningkatkan risiko operasional dan finansial, tetapi juga berimplikasi pada pengelolaan pajak. Oleh karena itu, *corporate governance* dapat ⁵⁰ berperan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini yang memperkuat atau melemahkan pengaruh *capital intensity* dan ⁶⁹ *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji faktor yang ⁴ mempengaruhi penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Pramita & Susanti (2023) Pengaruh *Transfer Pricing*, Koneksi Politik, *Thin Capitalization*,

dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance* dengan *Corporate governance* Sebagai Variabel Moderasi.² Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dengan koefisien -0,040⁷ dan nilai signifikansi $0,019 < 0,05$, maka hipotesis dinyatakan didukung. Variabel *corporate governance* dengan proksi dewan komisaris independen tidak mampu memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* dengan koefisien 0,009⁷ dan nilai signifikansi $0,304 > 0,05$, maka hipotesis tidak terdukung. Hal ini dikarenakan perusahaan pertambangan wajib memenuhi peraturan pemerintah dalam melakukan kegiatan *transfer pricing* terkait prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang berdampak pada terbatasnya perusahaan dalam¹¹⁹ melakukan penghindaran pajak melalui *transfer pricing*. Pengetatan aturan *transfer pricing* mengarahkan perusahaan untuk melakukan upaya *transfer pricing* dengan harga yang wajar agar tidak terkena sanksi sehingga mampu menekan²⁶ tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ghazali (2021b)²⁰ *Return On Asset*, Intensitas Modal, *Tax Avoidance: Corporate governance* Sebagai Variabel Moderasi.⁶ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan nilai signifikansi sebesar $0,168 > 0,05$ dan nilai t 1,385 serta nilai B 0,017. Variabel *corporate governance* tidak⁸⁶ mampu memoderasi hubungan intensitas modal terhadap *tax avoidance* dengan nilai signifikansi $0,878 > 0,05$, maka hasil tersebut tidak signifikan. Hal ini⁶ menunjukkan besar kecilnya nilai intensitas modal tidak mempengaruhi terhadap tindakan *tax avoidance*. Perusahaan dengan jumlah aset tetap yang digunakan

untuk operasi perusahaan guna menunjang kegiatan perusahaan. Hal ini dikarenakan ⁶ *asymetri* informasi antara *agent* dan *principal* menuntut perusahaan menerapkan *corporate governance* untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen. Pada kenyataannya *corporate governance* tidak mampu memperkuat hubungan antara intensitas modal terhadap *tax avoidance*. Hal ini disebabkan peran dewan komisaris independen sebagai pengawas jalannya perusahaan tidak dapat mencegah perusahaan melakukan investasi aset tetap.

Penelitian yang dilakukan oleh Santo & Nastiti (2023) Pengaruh *Financial Distress*, ¹ *Leverage*, dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* dengan memiliki nilai $0,094 > 0,05$, maka hipotesis tersebut ditolak. Hal ini dikarenakan modal yang diinvestasikan kedalam *fixed asset* bisa mengatasi konflik antara saham dengan manajemen perusahaan. Penyebabnya adalah perundang-undangan menyebabkan bahwa ¹⁰ perusahaan yang ada di Indonesia memiliki aset tetap yang sudah melewati batas waktu. Aset tetap yang sudah lewat pada waktunya tidak bisa ¹²³ disusutkan dan tidak bisa menjadi pengurang laba sebelum pajak. Sehingga, *capital intensity* tidak bisa digunakan sebagai upaya ³¹ perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Berdasarkan ketidakkonsistenan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, serta fenomena yang terjadi, meliputi rendahnya penerimaan pajak di Indonesia, *tax ratio* yang tidak konsisten, tingginya aktivitas ekonomi informal, serta kerugian akibat *profit shifting*, sebagaimana dilaporkan dalam *Tax Justice Network* menunjukkan bahwa penghindaran pajak masih menjadi

persoalan struktural dalam sistem perpajakan nasional. Selain itu, adanya penunggakan pajak oleh wajib pajak bernilai besar dan masih adanya celah regulasi yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk menekan beban pajak. Situasi tersebut menegaskan perlunya analisis terhadap faktor internal perusahaan yang berpengaruh terhadap kecenderungan melakukan praktik penghindaran pajak. Alasan memilih objek penelitian pada perusahaan *Basic Materials* dikarenakan perusahaan ini memiliki karakteristik padat aset tetap dan intensitas transaksi berelasi yang tinggi, sehingga hal ini berpotensi memanfaatkan mekanisme depresiasi aset tetap maupun *transfer pricing* untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah, dengan *corporate governance* yang berperan sebagai pengendali yang tidak sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan.

Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan periode terbaru, yaitu 2021-2024, yang mencerminkan kondisi terkini suatu perusahaan setelah masa pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan kebijakan perpajakan baru, termasuk implementasi pajak minimum global. Selain itu, penelitian ini berfokus pada perusahaan *Basic Materials* yang memiliki kompleksitas transaksi dan struktur aset yang jarang dijadikan objek dalam penelitian. Penelitian ini juga menggabungkan variabel *capital intensity* dan *transfer pricing* dengan meamsukan *corporate governance* sebagai variabel moderasi dalam suatu model penelitian.

Berdasarkan penjelasan fenomena dan penelitian terdahulu, penting untuk memperdalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran

pajak serta pentingnya *corporate governance* sebagai pengawasan, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH CAPITAL INTENSITY DAN TRANSFER PRICING TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN BASIC MATERIALS YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA”**.

29

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Basic Materials* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024?
2. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Basic Materials* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024?
3. Apakah *corporate governance* dapat memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Basic Materials* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024?
4. Apakah *corporate governance* dapat memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Basic Materials* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024?

8

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris pengaruh *capital intensity*

terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Basic Materials* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024.

b. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Basic Materials* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024.

c. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris *corporate governance* dalam memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Basic Materials* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024.

d. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris *corporate governance* dalam memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Basic Materials* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1) Manfaat teoritis

a. *Capital Intensity* (Intensitas Modal)

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman dan memberikan kontribusi yang lebih luas untuk pengembangan ilmu akuntansi dan pemahaman mengenai *capital intensity* yang berperan dalam mempengaruhi praktik penghindaran pajak di perusahaan sektor *Basic Materials*.

b. *Transfer Pricing* (Penetapan Harga Transfer)

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memperdalam literatur mengenai *transfer pricing* dalam konteks perpajakan, bagaimana *transfer pricing* yang digunakan oleh perusahaan sektor *Basic Materials* dalam mengelola beban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah.

c. *Corporate governance* (Tata Kelola Perusahaan)

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai *corporate governance*, terutama terkait peran mekanisme tata kelola perusahaan dalam mengendalikan tindakan manajemen yang berkaitan dengan penghindaran pajak, serta dapat mempertegas pentingnya penerapan *corporate governance* dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas perusahaan.

d. *Tax avoidance* (Penghindaran Pajak)

Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai faktor yang berkontribusi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *Basic Materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2024.

2) Manfaat praktis

a. Untuk peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa peningkatan wawasan dan pemahaman peneliti mengenai penerapan teori akuntansi keuangan dan perpajakan, terutama yang berkaitan dengan praktik penghindaran pajak dan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) khususnya pada perusahaan *Basic Materials* di Indonesia.

b. Untuk Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk manajemen perusahaan *Basic Materials* dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan strategi efisiensi pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan, serta memperkuat penerapan prinsip *corporate governance*.

c. Untuk pemerintah atau otoritas pajak

Hasil ²⁴ penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah maupun otoritas pajak dalam penyusunan kebijakan perpajakan yang lebih tepat dan efektif, khususnya mengenai praktik penghindaran pajak yang terjadi pada sektor *Basic Materials*.

d. Untuk akademisi dan peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh akademisi maupun pihak-pihak yang berkepentingan sebagai referensi dan landasan pengembangan kajian yang berkaitan dengan *capital intensity*, *transfer pricing*, *corporate goverance* dan penghindaran pajak dalam penelitian selanjutnya. Serta temuan yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan perspektif baru dan memperkaya literatur yang sudah ada, sehingga dapat mendukung penelitian sebelumnya dalam memahami hubungan antar variabel yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas penulisan ini, penulis mengelompokkan terdiri dari 5 bab. Kemudian pada masing-masing bab akan terdiri dari beberapa sub, yang mana diantara bab yang satu dengan yang lain saling berhubungan seperti diuraikan ⁸ sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini adalah sebagai pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini merupakan telaah pustaka yang menguraikan landasan teori, penelitian³ terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, definisi operasional dan pengukuran variabel, pengumpulan data yang digunakan serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini merupakan bab pembahasan yang menguraikan gambaran umum objek penelitian, hasil³ penelitian dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

1 TELAAH PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Agency Theory

Jensen & Meckling (1976) merupakan peneliti pertama yang mengemukakan teori agensi yang dikembangkan pada pertengahan tahun 1970-an. Dalam konteks perusahaan, *agency theory* didefinisikan sebagai suatu hubungan kontraktual antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*) yang diberikan wewenang untuk mengelola perusahaan atas nama pemilik. Teori ini diasumsikan bahwa kedua pihak memiliki tujuan dan kepentingan yang tidak selalu sejalan, sehingga dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Dalam *agency theory*, dua pihak yang menjalin kontrak mengalami ketidakseimbangan informasi, hal ini berarti dimana *agent* mempunyai akses informasi yang lebih luas tentang perusahaan dibandingkan dengan *principal*. Pada kondisi perbedaan kepentingan dan ketidakseimbangan informasi ini mendorong agar manajemen dapat bersikap lebih agresif lagi dalam mengoptimalkan perencanaan pajak (Wardani & Dawa, 2022). Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* pada suatu perusahaan dapat mempengaruhi kinerja dari perusahaan tersebut, diantaranya adalah kebijakan perusahaan mengenai pajak. Maka dari itu perusahaan berupaya memaksimalkan kinerja perusahaan melalui penerapan

kebijakan tertentu, termasuk strategi ¹⁴ penghindaran pajak yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak perusahaan tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku (Putra & Kurniaty, 2024).

¹⁵ *Agency theory* menjelaskan bahwa praktik penghindaran pajak muncul akibat adanya konflik kepentingan dalam manajemen antara pemilik dan manajer. Manajer (*agent*) memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi internal dan kendali atas proses penyusunan laporan keuangan berpotensi mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu, sehingga praktik penghindaran pajak menjadi bentuk perilaku oportunistik akibat lemahnya pengawasan (Apriani, 2025).

⁶¹ *Agency theory* juga dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara ¹¹ *capital intensity* dan penghindaran pajak. Dalam teori ini menyatakan bahwa terdapat adanya konflik kepentingan antara pemilik dan manajer. Di mana manajemen dapat mengalokasikan dana menganggur perusahaan ke dalam aset tetap, sehingga meningkatkan *capital intensity* dan memberikan ¹⁴ ruang untuk memanfaatkan beban depresiasi sebagai pengurang kewajiban pajak. Praktik tersebut dapat menjadi salah satu bentuk strategi *tax planning* yang berpotensi mengarah pada penghindaran pajak (Sari & Indrawan, 2022).

Di sisi lain, *Agency theory* juga relevan untuk menjelaskan bagaimana perusahaan memanfaatkan kebijakan internal dalam mengelola beban pajaknya. Salah satu praktik tersebut adalah ⁶⁵ *transfer pricing*, yaitu penetapan harga transaksi antar entitas dalam satu grup perusahaan, khususnya pada perusahaan dengan operasi lintas negara. Dalam perspektif *agency theory*, praktik ini muncul

57 akibat konflik kepentingan antara manajemen sebagai *agent* dan *principal*. Manajemen yang memiliki akses lebih besar terhadap informasi dan keputusan keuangan dapat mengatur harga transfer untuk menguntungkan pihak tertentu, sekaligus memengaruhi besarnya pajak yang harus dibayarkan perusahaan (Apriani, 2025).

Hubungan antara *agency theory* dan *corporate governance* itu dapat dilihat dari perlunya pengawasan dan pengendalian manajemen agar pengelolaan perusahaan tetap sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Pengawasan tersebut penting untuk menjaga kepentingan pemilik, karena tanpa kontrol yang memadai manajemen dapat bertindak demi kepentingan pribadi sehingga pada akhirnya dapat menurunkan kinerja dan profitabilitas perusahaan (Wardani & Dawa, 2022).

40 2.1.2. Teori Akuntansi Positif

Watts & Zimmerman (1986) merupakan peneliti yang mengemukakan Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*), yang selanjutnya disingkat menjadi PAT pertama kali dikemukakan oleh Watts & Zimmerman pada tahun 1978, 1979, dan 1986. Teori ini merupakan salah satu teori penting dalam perkembangan literatur dalam penelitian akuntansi yang berfokus pada upaya menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan. Teori akuntansi positif tidak bertujuan untuk menentukan metode akuntansi yang seharusnya diterapkan oleh perusahaan, melainkan untuk menjelaskan alasan di balik pemilihan kebijakan dan metode akuntansi tertentu oleh manajemen.

Dalam teorinya, Watts & Zimmerman (1986) menyatakan bahwa perusahaan akan memilih metode akuntansi yang paling sesuai dengan

kepentingan ekonominya, baik untuk meningkatkan kinerja keuangan yang dilaporkan maupun untuk meminimalkan biaya yang harus ditanggung perusahaan, termasuk beban pajak dan biaya politik lainnya. Teori akuntansi positif berasumsi bahwa setiap individu dalam perusahaan bertindak rasional dan berorientasi pada kepentingan pribadi (*self-interest*), sehingga mendorong munculnya perilaku sikap oportunistik dalam pengambilan keputusan akuntansi.

Teori akuntansi positif bertujuan menjelaskan dan memprediksi perilaku perusahaan dalam memilih kebijakan atau metode akuntansi yang diterapkan dalam praktik. Teori ini menekankan bahwa pemilihan kebijakan akuntansi tidak bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan manajemen serta struktur tata kelola perusahaan. Dalam konteks, *corporate governance*, kebijakan akuntansi dipandang sebagai bagian dari mekanisme pengendalian untuk meminimalkan biaya kontrak yang timbul akibat konflik kepentingan antara manajer, pemegang saham dan kreditur. Menurut Watts & Zimmerman (1986) menjelaskan bahwa teori akuntansi positif ini didukung dengan tiga hipotesis utama yang melatarbelakangi seseorang yang mempunyai perilaku oportunistik, diantaranya sebagai berikut:

1) Hipotesis Rencana Bonus (*Bonus Plan Hypothesis*)

Hipotesis ini menjelaskan bahwa manajer perusahaan yang memperoleh kompensasi berbasis laba cenderung memilih metode atau prosedur akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode berjalan. Dengan asumsi kondisi lain tetap, manajer akan memanfaatkan fleksibilitas dalam kebijakan akuntansi khususnya terkait akrual, hal ini dimanfaatkan untuk

menggeser pengakuan laba dari periode mendatang ke periode saat ini guna untuk memaksimalkan bonus. Hipotesis ini dinilai cukup rasional, karena manajer cenderung ⁴⁰ menginginkan imbalan yang tinggi. Jika bonus mereka bergantung pada laba bersih yang dilaporkan, maka mereka cenderung meningkatkan laba tersebut agar bonus yang diterima lebih besar.

26

2) Hipotesis Perjanjian Utang (*Debt Covenant Hypothesis*)

Hipotesis ini menjelaskan bahwa perusahaan yang mendekati pelanggaran perjanjian utang cenderung memilih ⁴ metode akuntansi yang meningkatkan laba atau aset yang dilaporkan. Tujuannya adalah untuk menghindari biaya pelanggaran perjanjian utang dan menjaga rasio keuangan tetap sesuai dengan ketentuan kreditur.

26

3) Hipotesis Biaya Politik (*Political Cost Hypothesis*)

Hipotesis ini menjelaskan bahwa perusahaan menghadapi tekanan politik tinggi, seperti pajak dan regulasi, cenderung memilih kebijakan akuntansi yang menurunkan laba yang dilaporkan. Strategi ini dilakukan untuk mengurangi perhatian publik dan tekanan dari pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya.

Teori akuntansi positif menjelaskan bahwa dalam praktik perusahaan terdapat tiga bentuk hubungan keagenan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, hal ini meliputi hubungan antara manajemen dan pemilik perusahaan, antara manajemen dan kreditur, serta antara manajemen dan pemerintah. Dalam masing-masing hubungan ini, manajemen (*agent*) memiliki kepentingan pribadi yang ¹¹ tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemilik

perusahaan, sehingga mendorong manajemen (*agent*) untuk mengambil keputusan akuntansi tertentu guna memaksimalkan kepentingan sendiri (Fitriana *et al.*, 2023).

73

2.1.3. Tax Avoidance

2.1.3.1. Pengertian Tax Avoidance

Menurut Santo & Nastiti (2023), penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan strategi manajemen pajak yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah atau ketidaktegasan peraturan perpajakan untuk mengurangi beban pajak perusahaan. *Tax avoidance* menurut Sinaga & Malau (2021) merupakan cara perusahaan dalam melakukan efisiensi beban pajak dengan mengalihkan atau mengatur transaksi ke bentuk yang pada dasarnya tidak dikenai pajak, sehingga kewajiban pajak menjadi lebih rendah tanpa melanggar aturan yang berlaku.

22

Penelitian Janide *et al.*, (2025) menjelaskan bahwa *tax avoidance* merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan, termasuk aturan yang belum diatur secara jelas, namun masih berada dalam batasan ketentuan hukum. Berdasarkan dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan legal yang dilakukan oleh perusahaan dengan memanfaatkan celah dari ketentuan perpajakan dan juga aturan yang belum diatur dengan jelas tetapi masih berada di dalam batasan ketentuan hukum, sehingga beban pajak yang harus dibayar relatif lebih rendah.

75

2.1.3.2. Tujuan *Tax Avoidance*

Praktik penghindaran pajak secara hukum tidak bertentangan dengan ketentuan yang tertera dalam undang-undang, namun tindakan ini tidak sejalan dengan tujuan utama dari peraturan perpajakan. ⁹³ Perusahan melakukan penghindaran pajak tidak hanya untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, tetapi juga sebagai strategi untuk meningkatkan arus kas (*cash flow*) pada perusahaan (Aya & Hariyanti, 2022).

Menurut Madani *et al.*, (2023), praktik penghindaran dapat memberikan keuntungan jangka pendek berupa penurunan beban pajak sehingga laba perusahaan meningkat. Namun di sisi lain, aktivitas ini berpotensi menimbulkan risiko jangka panjang. Hal ini terjadi karena penghindaran pajak sering dipandang sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga dapat memicu timbulnya ketidakpatuhan, praktik curang, dan potensi pemeriksaan oleh otoritas pajak. Kondisi tersebut membuat praktik ini menjadi strategi yang menguntungkan dalam jangka pendek tetapi tetap membawa konsekuensi risiko yang harus diwaspadai perusahaan dalam jangka panjang.

2.1.3.3. Pengukuran *Tax Avoidance*

Mengukur sejauh mana sebuah ²² perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak dapat dilakukan dengan memperkirakan seberapa besar perusahaan ²² memanfaatkan celah yang terdapat didalam ketentuan peraturan perpajakan. Di sisi keuntungan, tindakan ini dapat memungkinkan perusahaan untuk menghemat kas karena jumlah pajak yang dibayarkan relatif kecil, sehingga hal ini dapat meningkatkan jumlah kas yang tersedia untuk kegiatan operasional

ataupun investasi. Namun tindakan ini juga memiliki risiko, diantaranya terkena sanksi oleh otoritas pajak apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan, penurunan nilai saham karena kehilangan kepercayaan oleh investor, serta hilangnya nama baik perusahaan (Rasya & Ratnawati, 2023). Menurut Hanlon & Heitzman (2010), metode pengukuran untuk mengetahui penghindaran pajak terdapat berbagai macam ukuran diantaranya sebagai berikut:

- 1) Ukuran ²² *Effective Tax Rate* (ETR), ETR diukur dengan membandingkan estimasi beban pajak terhadap besaran laba sebelum pajak atau arus kas. Indikator ini menunjukkan berapa besar rata-rata tarif pajak yang dikenakan pada setiap unit laba atau arus kas perusahaan
- 2) *Long-run Effective Tax Rates*, ETR jangka panjang dihitung dengan membandingkan total pembayaran kas untuk pajak penghasilan selama 10 tahun dengan total laba bersih sebelum pajak pada periode yang sama.
- 130 3) *Book-tax Differences*, diperoleh dari selisih antara laba akuntansi dan laba pajak. Besarnya selisih tersebut mencerminkan tingkat penghindaran pajak. Namun Hanlon dan Heitzman menegaskan bahwa ukuran ini rentan kurang akurat karena kualitas laba antarperusahaan berbeda dan hanya mencerminkan bentuk *non-conforming tax avoidance*. Mereka juga menekankan bahwa ukuran ini tidak cocok untuk membandingkan penghindaran pajak antarperusahaan dengan tingkat kepentingan laba akuntansi yang berbeda.
- 4) *Discretionary or “abnormal” measures of tax avoidance*, Desai (2006) dan Desai & Dharmapala (2009) mengukur buku pajak *abnormal* dengan meregresikan total perbedaan buku pajak terhadap total akrual, di mana total

akrual digunakan sebagai pengendali untuk praktik manajemen laba. Nilai residual dari regresi tersebut kemudian dijadikan proksi penghindaran pajak. Sementara itu, Frank *et al.*, (2009) menghitung komponen *diskresioner* (DTAX) dari PERMDIFF yaitu selisih antara tarif pajak efektif dan tarif pajak *statutory* yang dikalikan dengan laba akuntansi sebelum pajak.

5) *Unrecognized tax benefits* (UTB), proksi ini menggunakan tingkat dan perubahan UTB, yaitu cadangan untuk ketidakpastian pajak di masa depan. UTB dipengaruhi oleh faktor pajak dan insentif pelaporan keuangan. UTB yang tinggi menandakan ketidakpastian posisi pajak yang lebih besar dan mencerminkan tingkat penghindaran pajak, sementara manfaat pajak yang tidak diakui bergantung pada *judgment* akrual manajemen.

6) *Tax Shelter Firms*, ukuran ini dapat digunakan untuk mendeteksi praktik penghindaran pajak internasional pada level transaksi. Namun, ukuran ini berisiko dalam menimbulkan *selection bias* karena hanya mencakup perusahaan yang terdeteksi atau diwajibkan mengungkapkan aktivitas *tax shelter*. Selain itu, ukuran ini juga berpotensi *endogenous*, karena tidak semua perusahaan yang mampu mengurangi pajak terlibat dalam *tax shelter*, dan perusahaan yang tidak dapat menghindari pajak bisa saja salah diklasifikasikan sebagai pelakunya.

2.1.4. Capital Intensity

2.1.4.1. Pengertian Capital Intensity

Menurut Murniati & Sovita (2022) ¹⁰⁶ *capital intensity* dapat didefinisikan sebagai gambaran besarnya perusahaan dalam menginvestasikan asetnya,

terutama dalam aset tetap dan persediaan serta aset tetap yang dimiliki perusahaan juga merupakan aset yang dapat mengalami penyusutan. *Capital intensity* menurut Wahyuni (2024) merupakan besarnya investasi perusahaan pada aset tetap dan persediaan, semakin tinggi proporsi aset tersebut maka semakin besar pula kapasitas perusahaan dalam mendukung aktivitas operasional dan menghasilkan pendapatan. Dan *capital intensity* menurut Tantika & Masyitah (2023) mengungkapkan bahwa besarnya kekayaan perusahaan yang diinvestasikan pada aset tetap untuk mendukung aktivitas operasional.

Berdasarkan dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *capital intensity* merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar perusahaan dalam mengalokasikan kekayaannya pada aset tetap dan persediaan untuk mendukung operasional, menghasilkan pendapatan, serta memberikan peluang kepada perusahaan dalam pemanfaatan untuk mengurangi beban pajak melalui mekanisme depresiasi aset.

2.1.4.2. Faktor dan Dampaknya Terhadap *Capital Intensity*

Perusahaan bisa melakukan berbagai macam cara untuk menekan beban pajak yang harus dibayar ke pemerintah, salah satunya melalui kepemilikan aset tetap (Murniati & Sovita, 2022). Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1 (b) tentang Pajak Penghasilan, biaya penyusutan harta berwujud dan biaya amortisasi atas hak atau biaya lain yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto.

Menurut Cahyati & Darma (2023) *capital intensity* menjadi bagian dari kekayaan perusahaan yang memiliki pengaruh terhadap penurunan penghasilan

karena seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan. Depresiasi ini diakui sebagai biaya penyusutan, sehingga berperan dalam mengurangi laba kena pajak. Semakin tinggi biaya penyusutan yang dikeluarkan oleh perusahaan maka semakin rendah beban pajak yang harus dibayar. Tingkat rasio *capital intensity* yang tinggi mencerminkan tingkat pajak efektif yang lebih kecil (Cahyati & Darma, 2023).

2.1.4.3. Pengukuran *Capital Intensity*

Capital intensity merupakan suatu kegiatan investasi perusahaan yang diwujudkan dalam bentuk aset tetap, yang umumnya diukur dengan menggunakan rasio antara total aset tetap terhadap total aset perusahaan (Murniati & Sovita, 2022). Semakin tinggi rasio tersebut, semakin menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat ketergantungan yang besar terhadap aset tetap dalam mendukung aktivitas operasional. Artinya, investasi perusahaan lebih banyak teralokasikan pada aset jangka panjang yang digunakan secara terus menerus dalam proses produksi maupun penyediaan jasa (Wahyuni, 2024). *Capital intensity* dapat diukur dengan beberapa rumus, yakni sebagai berikut:

1) *Capital intensity ratio*

Menurut Tamplin (2022), *capital intensity ratio* didefinisikan sebagai alat analisis *ratio* yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dimanfaatkan dalam menghasilkan pendapatan. Rasio ini menunjukkan tingkat efektivitas penggunaan aset dalam kegiatan produksi. *Capital intensity* dapat diukur dengan membandingkan antara total aset terhadap total penjualan (*total revenue*).

2) *Fixed asset ratio*

Menurut Murniati & Sovita (2022), *fixed asset ratio* menggambarkan rasio atau proporsi aset tetap yang dimiliki suatu perusahaan. Rasio *fixed aset* diukur dengan menggunakan total aset tetap terhadap total aset perusahaan.

2.1.4.4. Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Ghozali (2021b), menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat dikarenakan besar kecilnya suatu nilai intentitas tidak mempengaruhi terhadap penghindran pajak. Perusahaan dengan jumlah aset tetap yang besar digunakan untuk operasi perusahaan guna menunjang kegiatan perusahaan.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ishak & Asalam (2023) bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, hal ini dikarenakan tingginya aset tetap yang dimiliki perusahaan dimanfaatkan secara langsung dalam menjalankan aktivitas operasional. Pemanfaatan aset tersebut mendorong peningkatan kinerja usaha, sehingga laba yang dihasilkan dapat dioptimalkan dan perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.5. *Transfer Pricing*

2.1.5.1. Pengertian *Transfer Pricing*

Menurut Pramita & Susanti (2023), *transfer pricing* merupakan suatu mekanisme penentuan harga yang tidak wajar dalam transaksi penyerahan barang atau jasa antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, mekanisme ini

dapat dilakukan dengan cara menaikkan atau menurunkan harga yang umumnya dilakukan oleh perusahaan multinasional. Menurut Apriani (2025), *transfer pricing* didefinisikan sebagai metode penentuan harga dalam transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau terafiliasi.

Menurut Marlina *et al.*, (2022), mengungkapkan bahwa *transfer pricing* merupakan penetapan harga atas transaksi antara dua entitas yang memiliki keterkaitan, baik dalam negeri maupun lintas negara. Praktik ini digunakan untuk mengatur nilai transaksi internal sesuai kepentingan manajerial. Berdasarkan penjelasan dari beberapa penelitian tersebut, maka disimpulkan bahwa *transfer pricing* adalah suatu kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam menentukan harga transaksi antar entitas yang memiliki hubungan khusus atau perusahaan yang saling terafiliasi yang mempunyai tujuan agar dapat mencapai keuntungan dan mengurangi beban pajak yang harus dibayar kepada pemerintah.

2.1.5.2. Tujuan *Transfer Pricing*

Transfer pricing sebagai suatu instrumen penetapan harga dalam transaksi antar entitas yang memiliki hubungan istimewa, namun juga berpotensi disalahgunakan oleh perusahaan untuk memanipulasi alokasi pendapatan antar yurisdiksi yang berbeda yang mana hal ini sangat relevan di Indonesia karena adanya risiko terjadinya erosi basis pajak (Anjarningsih & Duke, 2024). Perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara asing memanfaatkan perbedaan tersebut dengan cara mengalihkan atau mengatur pendapatannya sedemikian rupa untuk memperoleh laba yang besar di negara dengan tarif pajak yang rendah dan menekan pendapatan di negara dengan menerapkan tarif pajak

yang tinggi (Arviani & Setyawati, 2025).

Secara umum, perusahaan yang melakukan *transfer pricing* memiliki kebebasan dalam memilih prinsip yang dianggap paling sesuai dengan kondisi suatu perusahaan. Tujuan utama penetapan harga transfer internasional adalah untuk mengatur beban yang dapat mempengaruhi tujuan lain dalam perusahaan. Namun dalam praktiknya *transfer pricing* juga digunakan untuk daya saing perusahaan, mendukung evaluasi kinerja yang adil, serta memberikan motivasi bagi karyawan (Haztania & Lestari, 2023). Praktik ini dapat menimbulkan risiko berkurangnya penerimaan pajak dalam suatu negara (Abdullah *et al.*, 2021).

2.1.5.3. Pengukuran *Transfer Pricing*

Transaksi antar pihak berelasi di Indonesia diatur melalui ketentuan khusus, salah satunya PSAK No. 7 tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. Dalam konteks perpajakan, otoritas pajak turut mengawasi transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi untuk mencegah potensi berkurangnya penerimaan negara akibat *transfer pricing* (Anjarningsih & Duke, 2024). Di Indonesia, regulasi mengenai *transfer pricing* telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.03/2016 yang mewajibkan setiap perusahaan menyusun dokumentasi *transfer pricing* yang digunakan untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pelaporan keuangan.

Menurut Turwanto *et al.*, (2022), dalam suatu ketentuan perpajakan, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan harga transfer yang wajar pada suatu perusahaan multinasional, yakni sebagai berikut:

- 1) Metode perbandingan harga (*Comparable Uncontrolled Price/CUP*), metode

perbandingan harga yaitu membandingkan harga transaksi antara pihak berelasi dengan harga serupa pada pihak independen. Meskipun dianggap paling akurat, metode ini sulit diterapkan jika barang bersifat unik.

40

2) Metode harga penjualan kembali (*Resale Price Method/RPM*), metode ini digunakan ketika perusahaan membeli barang dari pihak berelasi lalu menjualnya kembali kepada pihak lain. Harga jual dikurangi margin laba kotor wajar akan menunjukkan harga beli yang seharusnya.

1

3) Metode biaya-plus (*Cost Plus Method*), metode biaya-plus menambahkan laba kotor wajar berdasarkan transaksi serupa dengan pihak independen atau perusahaan lain yang sebanding. Umumnya digunakan pada perusahaan manufaktur untuk memastikan margin laba sesuai kondisi pasar dan mencegah manipulasi harga.

40

4) Metode pembagian harga (*Profit Split Method/PSM*), metode ini menghitung laba gabungan dari transaksi dengan pihak berelasi, kemudian membaginya berdasarkan dasar ekonomi yang wajar, seolah-olah terjadi antara pihak independen. Pembagian laba dilakukan melalui metode kontribusi atau metode sisa pembagian laba, sesuai kontribusi pihak masing-masing.

41

2.1.5.4. Pengaruh *Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance*

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pramita & Susanti (2023), menunjukkan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena Wajib Pajak Badan pada sektor pertambangan harus mematuhi ketentuan pemerintah mengenai *transfer pricing* yang mengikuti prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Kepatuhan ini membatasi

ruang perusahaan untuk memanfaatkan *transfer pricing* sebagai sarana ³ penghindaran pajak.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Latu & Merkusiwati ⁴⁵ (2024), bahwa *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa naik turunnya nilai *transfer pricing* tidak berpengaruh pada tingkat penghindaran pajak, kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh pembaruan kebijakan pemerintah, di mana aturan harga transfer diterapkan untuk mengendalikan praktik *tax avoidance*.

⁶⁰ 2.1.6. *Corporate Governance*

2.1.6.1. Pengertian *Corporate Governance*

Menurut Arviani & Setyawati (2025), *corporate governance* didefinisikan sebagai sistem ⁵ tata kelola perusahaan yang menggambarkan hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan untuk menentukan arah serta kinerja perusahaan. Menurut Nur'aini & Sherlita (2023), yang didefinisikan oleh FCGI (*Forum Corporate governance On Indonesia*) sebagai sistem yang mengatur dan mengawasi ¹ hubungan antara pemegang saham, manajemen perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemangku kepentingan lainnya baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Corporate governance menurut Pramita & Susanti (2023) ⁹ merupakan sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar setiap tindakan manajer tetap sesuai dengan harapan pemilik. Melalui pengawasan ini, aktivitas perusahaan dapat berjalan lebih teratur dan selaras dengan tujuan

utama perusahaan. Berdasarkan beberapa penjelasan dari penelitian diatas ² dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* adalah mekanisme pengawasan yang memastikan manajemen menjalankan aktivitas perusahaan sesuai dengan tujuan dan kepentingan pemilik, sehingga operasional perusahaan tetap terarah dan mendukung pencapaian sasaran ¹⁰⁰ perusahaan.

2.1.6.2. Prinsip-prinsip *Corporate Governance*

Salah satu elemen penting dari *corporate governance* yang dapat mempengaruhi keputusan mengenai penghindaran pajak adalah efektivitas pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen dan pemegang saham utama (Marfiana & Andriyanto, 2021). Menurut Harinurdin & Safitri (2023), OECD yang dikutip dari FCGI ¹² (*Forum for Corporate governance in Indonesia*) menjelaskan bahwa *corporate governance* terdiri dari 4 unsur penting, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Keadilan (*Fairness*), prinsip ini menekankan pentingnya ² perlindungan hak seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan investor asing. Perusahaan harus melakukan semua pemilik kepentingan secara adil serta memenuhi komitmen yang telah dibuat kepada para investor.
- 2) Transparansi (*Transparency*), prinsip ini mengharuskan perusahaan menyediakan informasi yang lengkap, akurat, jelas, dan disajikan tepat waktu. Informasi tersebut mencakup kondisi keuangan, struktur kepemilikan, hingga proses pengolahan perusahaan, sehingga dapat dibandingkan dan dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- 3) Akuntabilitas (*Accountability*), menuntut kejelasan peran dan tanggung jawab

dalam struktur organisasi. Prinsip ini memastikan adanya mekanisme pengawasan dan keseimbangan antara kepentingan manajemen dan pemegang saham.

- 4) Pertanggung jawaban (*Responsability*), prinsip ini menekankan bahwa perusahaan harus mematuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan etika dalam menjalankan operasi bisnis.

Setiap perusahaan perlu menerapkan ¹⁹ tata kelola perusahaan yang baik dan menghindari praktik penghindaran pajak. Penerapan *corporate governance* dapat mengurangi kemungkinan akan terjadinya ¹²¹ praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan adanya *corporate governance*, kegiatan ¹²⁵ operasional perusahaan bisa berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan, karna sistem ini berperan sebagai pengawas kinerja manajemen agar pelaksanaan tata kelola perusahaan tetap dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Wardani & Dawa, 2022).

2.1.6.3. Pengukuran Corporate Governance

Menurut Sari (2021), *corporate governance* atau tata kelola perusahaan memiliki empat aspek utama dalam melakukan pengukuran, antara lain sebagai berikut:

1) Dewan komisaris

Peran dewan komisaris dalam suatu perusahaan terutama berfokus pada kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh direksi. Keberadaan dewan komisaris diharapkan mampu mengurangi potensi konflik

keagenan yang dapat muncul antar direksi dan pemegang saham pada perusahaan.

2) Dewan direksi

Berperan dalam mengawasi dan memastikan pengelolaan perusahaan berjalan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan perusahaan. Sebagai pengarah utama, dewan direksi juga diharapkan menjadi teladan dalam penerapan kode etik dan praktik *corporate governance*.

3) Komite audit

Menurut ketentuan hukum di Indonesia, perusahaan publik wajib membentuk ¹²⁷ komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris. Komite audit bertugas mendukung ^{pengawasan} terkait audit eksternal, audit internal, dan pengendalian internal.

4) Kepemilikan institusional

Kepemilikan institusional merupakan ⁶⁷ salah satu mekanisme *corporate governance* yang berperan dalam menekan konflik keagenan. Semakin besar kepemilikan ^{institusional} pada perusahaan, maka semakin kuat dorongan bagi investor institusi untuk mengawasi dan menilai kinerja manajemen.

5) Kepemilikan manajerial

⁹⁴ Kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh pihak manajemen yang secara langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan perusahaan (Pratiwi & Karlina, 2026).

Penelitian ini mengukur *corporate governance* dengan menggunakan proporsi dewan komisaris independen. ¹¹⁰ Keberadaan komisaris independen

berperan dalam mencegah praktik penghindaran pajak. Jika jumlah komisaris independen dalam perusahaan sedikit, maka pengawasan terhadap kinerja manajer dalam menjalankan tugasnya kurang baik dan tidak sesuai dengan peraturan sehingga mengarah ke praktik penghindaran pajak (Wardani & Dawa, 2022).

2.1.6.4. Pengaruh *Corporate Governance* dalam Memoderasi *Capital Intensity*

8 Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ghozali (2021b), mengungkapkan bahwa *corporate governance* tidak dapat memoderasi hubungan intensitas modal terhadap *tax avoidance*. Adanya *asymetri* informasi antara *agent* dan *principal* seharusnya mendorong penerapan *corporate governance* untuk mengawasi kinerja manajemen. Namun, dalam praktiknya, mekanisme tata kelola perusahaan tidak mampu memperkuat pengaruh intensitas modal terhadap *tax avoidance*. Kondisi ini terjadi karena peran dewan komisaris independen sebagai pengawas tidak efektif dalam membatasi keputusan perusahaan untuk meningkatkan investasi pada aset tetap, yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk menghindari beban pajak. Perusahaan yang melakukan investasi aset tetap untuk mendukung operasional dan meningkatkan laba, bukan sebagai strategi menghindari pajak.

3 Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayah & Ernandi (2022), mengungkapkan bahwa *corporate governance* dapat memoderasi hubungan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Namun, peningkatan jumlah komisaris independen tidak selalu menjamin efektivitas fungsi pengawasan terhadap manajemen. 12 Dalam beberapa kasus keberadaan dewan komisaris independen hanya bertujuan untuk memenuhi ketentuan Bursa Efek Indonesia

(BEI). Kondisi tersebut²⁵ menyebabkan peran dewan komisaris independen tidak optimal dalam menekan praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen.

2.1.6.5. Pengaruh *Corporate Governance* dalam Memoderasi³⁴ *Transfer Pricing*

Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Budiarta & Nugraha (2025),³ menyatakan bahwa *corporate governance* dengan proporsi dewan komisaris independen mampu memoderasi secara signifikan pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin kuat peran dan fungsi pengawasan dewan komisaris independen,¹⁴⁵ maka semakin efektif pula upaya dalam menekan dampak negatif *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.⁶⁵ Dengan kata lain, dewan komisaris independen berperan penting dalam memastikan aktivitas *transfer pricing* tetap berada dalam batas kewajaran dan tidak dimanfaatkan untuk tujuan penghindaran pajak.

¹⁰ Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yohana *et al.*, (2022),³ menyatakan bahwa *corporate governance* dengan proporsi dewan komisaris independen tidak dapat memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan semakin besar proporsi dewan komisaris independen maka semakin kesulitan dalam mencapai kesepakatan,⁴⁸ karena adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya efektivitas dalam penyelesaian masalah operasional. Akibatnya, manajemen dapat memanfaatkan informasi yang telah dimilikinya untuk melakukan praktik *transfer pricing*, yang pada akhirnya dapat menurunkan beban pajak yang harus dibayarkan dan memberikan keuntungan bagi pihak manajemen¹²⁶

suatu perusahaan.

2.2. Penelitian Terdahulu

7 No	Nama Pengarang / Tahun	Judul dan Identitas Jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Yulinda Devi Pramita, Eka Novia santi 2023	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , Koneksi Politik, <i>Thin Capitalization</i> , dan Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan <i>Corporate Governance</i> Sebagai Variabel Moderasi Jurnal Akuntansi Inovatif Vol. 1 No. 2, 2023	<i>Transfer Pricing, Thin Capitalization, Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Tax Avoidance, Corporate governance</i>	Hasil penelitian menunjukkan <i>transfer pricing</i> , koneksi politik dan <i>thin capitalization</i> memiliki pengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Corporate social responsibility</i> memiliki pengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Corporate governance</i> yang diproksi oleh dewan komisaris independen mampu memoderasi pengaruh <i>transfer pricing</i> dan <i>corporate social responsibility</i> terhadap <i>tax avoidance</i> , namun tidak mampu memoderasi pengaruh koneksi politik dan <i>thin capitalization</i> terhadap <i>tax avoidance</i> .
2	Ahmad Ghozali 2021	<i>Return On Asset</i> , Intensitas Modal, <i>Tax Avoidance</i> ; <i>Corporate Governance</i> Sebagai Variabel Moderasi LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi Vol 1 No 1	<i>Return On Asset, Intensitas Modal, Tax Avoidance, Corporate Governance</i>	Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di atas, kesimpulan penelitian ini adalah <i>return on asset</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . Intensitas modal tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Corporate governance</i> mampu memoderasi hubungan antara <i>return on asset</i>

7 No	Nama Pengarang / Tahun	Judul dan Identitas Jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisis Data	Hasil Penelitian 6
		(2021): Desember 2021 ISSN 2810-0921		dengan <i>tax avoidance</i> . <i>Corporate governance</i> tidak mampu memoderasi hubungan intensitas modal dan <i>tax avoidance</i> .
3	16 Vianty Adella Santo, Cipbarani Dwi Nastiti 2023	Pengaruh <i>financial distress, leverage</i> dan <i>capital insenty</i> terhadap <i>tax avoidance</i> AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol5, No. 1, 2023, 1-10 eISSN 2585-2888	<i>Financial distress, leverage, 64 pital insenty, tax avoidance</i>	Jadi dapat disimpulkan bahwa <i>leverage</i> 20 ngaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , variabel <i>financial distress</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> dan variabel <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
4	Andi Chaerunni sa Ishak, Ardan gani 3 salam 2023	Pengaruh Koneksi Politik, <i>Capital Intensity</i> , dan <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Owner: Riset & Jurnal Akuntansi Volume 7 Nomor 4, 63 tober 2023 e-ISSN : 2548-9224 p-ISSN : 2548-7507	43 Koneksi Politik, <i>Capital Intensity, Corporate Social Responsibility Disclosure, Tax avoidance</i>	Dari hasil pengujian secara sim 43 n ditemukan bahwa koneksi politik, <i>capital intensity</i> , dan <i>corporate social responsibility disclosure</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa <i>capital intensity</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . Selain itu koneksi politik dan <i>corporate social responsibility disclosure</i> secara parsial tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
5	Yoga Firmansya	Pengaruh <i>Leverage</i> ,	<i>Leverage, Transfer</i>	Hasil penelitian dari Hipotesis (H1)

7 No	Nama Pengarang / Tahun	Judul dan Identitas Jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisis Data	Hasil Penelitian
	h, I Gede Adi Indrawan 2025	65 <i>Transfer Pricing, Dan Intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance</i> Jurnal Dinamika Pendidikan Nusantara Vol. 6, No. 3, Agustus 2025	Pricing, Intensitas Modal, Tax Avoidance	menunjukkan adanya pengaruh <i>Leverage</i>, <i>Transfer Pricing</i> dan Intensitas modal secara bersama-sama (simultan) terhadap <i>Tax Avoidance</i> yang dapat dilihat dari hasil uji F (simultan) ditemukan bahwa hipotesis berpengaruh secara simultan terhadap <i>Tax Avoidance</i>. Temuan penelitian menunjukkan bahwa <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>, <i>Transfer Pricing</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>, dan Intensitas modal tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>. 55
6	Anugrah Janide, Nirwana, Andi Kusumawati 2025	<i>The Influence of Institutional Ownership, Capital Intensity, and Transfer Pricing on Tax Avoidance with Good Corporate governance as a Moderating Variable</i> 124 Proceedings of the 9th International Conference on Accounting, Management,	56 Institutional Ownership, Capital Intensity, Transfer Pricing, Tax Avoidance, Good Corporate governance	The results of the study indicate that institutional ownership and capital intensity have a positive effect on tax avoidance, transfer pricing has a negative effect on tax avoidance, while good corporate governance is able to moderate the effect of institutional ownership on tax avoidance and good corporate governance does not moderate the effect of capital intensity and transfer pricing on tax avoidance.

7 No	Nama Pengarang / Tahun	Judul dan Identitas Jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisis Data	Hasil Penelitian
		and Economics 2024 (ICAME)	5	42
7	Sapta Setia Darma, Azizah Eka Mahyati 2022	Pengaruh <i>Transfer Pricing, Sales Growth</i> , dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020) AKUNTOTEK NOLOGI: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi VOL.14.NO.1	<i>Transfer Pricing, Sales Growth, Capital Intensity</i> , Penghindaran Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan <i>transfer pricing, sales growth</i> , dan <i>capital intensity</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan secara parsial menyatakan bahwa: 1) <i>transfer pricing</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> 2) <i>sales growth</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , 3) <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
8	15 Tegar Prasetyo, Alexander Raphael 2024	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> , Umur Perusahaan, Komite Audit, dan <i>Board Gender Diversity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 3 No. 4	11 <i>Capital Intensity</i> , Umur Perusahaan, Komite Audit, <i>Board Gender Diversity</i> , <i>Tax Avoidance</i>	41 dapat disimpulkan bahwa 1) <i>capital intensity</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> ; 2) umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> ; 3) komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> ; 4) <i>board gender diversity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
9	I Gede Budiarta,	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i>	<i>Transfer Pricing</i> ,	dapat disimpulkan penetapan harga transfer

7 No	Nama Pengarang / Tahun	Judul dan Identitas Jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisis Data	Hasil Penelitian
	Dewa Gede Jimbar Nugraha 2025	2 dan <i>Political Connection Terhadap Tax Avoidance</i> Dengan <i>Corporate governance</i> Sebagai Pemoderasi Seminar Nasional Manajemen dan <i>Call for Papers</i> (SENIMA 10) Vo. 10 No.1	104 <i>Political Connection, Tax Avoidance, Corporate governance</i>	berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , sementara <i>political connection</i> tidak 9 berpengaruh signifikan. Dewan komisaris independen dan komite audit secara signifikan memoderasi pengaruh penetapan harga transfer terhadap <i>tax avoidance</i> sebagai 21 moderasi murni, serta memoderasi pengaruh <i>political connection</i> terhadap <i>tax avoidance</i> sebagai moderasi potensial.
10	Rani Arviani, Wiwit 49 tyawati 2025	Pengaruh Beban Pajak Tanggung, <i>Corporate governance</i> , dan <i>Transfer Pricing</i> Terhadap Penghindaran Pajak Jurnal Nusa Akuntansi, Vol.2 No.3	49 Beban Pajak Tanggung, <i>Corporate governance</i> , <i>Transfer Pricing</i> , Penghindaran Pajak	Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, ditunjukkan bahwa Beban Pajak Tanggungan, 17 <i>Corporate governance</i> , dan <i>Transfer Pricing</i> secara simultan memiliki pengaruh terhadap Penghindaran pajak. Secara parsial, hanya Beban Pajak Tanggungan yang memiliki pengaruh terhadap Penghindaran pajak, sedangkan <i>Corporate governance</i> dan <i>Transfer Pricing</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Penghindaran pajak

Sumber: Data diolah dari berbagai penelitian terdahulu (2021-2024)

2.3. Kerangka Pemikiran

³⁵ *Tax avoidance* merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka mengurangi beban pajak yang harus dibayar, melalui penggunaan sumber daya yang dimiliki dan memanfaatkan celah-celah perpajakan yang ada (Oktafia & Sicillia, 2024). Meskipun penghindaran pajak sering kali dianggap sah secara ⁵⁰ hukum, praktik ini tetap berpotensi merugikan bagi negara karena dapat mengurangi jumlah penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah (Rusdiyanti & Nurhayati, 2024). ⁷ Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak serta mekanisme yang dapat mengendalikannya.

⁶⁶ Salah satu faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak adalah *capital intensity*, merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar perusahaan dalam mengalokasikan kekayaannya ⁴⁵ pada aset tetap dan persediaan untuk mendukung operasional, menghasilkan pendapatan, serta memberikan peluang kepada perusahaan dalam pemanfaatan ¹⁰⁵ untuk mengurangi beban pajak melalui mekanisme depresiasi aset. ¹⁰ Semakin tinggi biaya penyusutan yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka semakin rendah beban pajak yang harus dibayar (Cahyati & Darma, 2023). Hasil penelitian dari Ishak & Asalam (2023) ⁶⁸ menemukan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Santo & Nastiti (2023) menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain itu, faktor lain yang juga berkaitan dengan praktik penghindaran pajak adalah ⁴⁷ *transfer pricing*, didefinisikan sebagai suatu kebijakan yang

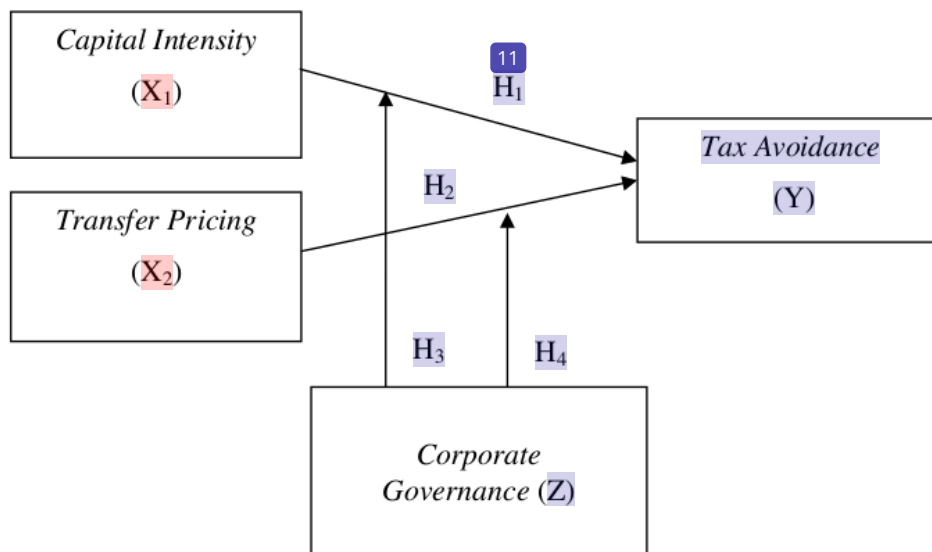
dilakukan perusahaan untuk menentukan harga transaksi antar entitas yang memiliki hubungan khusus agar dapat mencapai keuntungan dan mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Perusahaan yang terlibat dalam aktivitas *transfer pricing* dapat melakukan praktik penghindaran pajak dengan cara menambah beban pajak mereka (Arviani & Setyawati, 2025). Penelitian dari Pramita & Susanti (2023) menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah & Indrawan (2025) menemukan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Namun, tidak semua perusahaan dengan tingkat *capital intensity* dan *transfer pricing* yang tinggi selalu melakukan praktik penghindaran pajak. Menurut FCGI (*Forum corporate governance in Indonesia*), *corporate governance* dapat didefinisikan sebagai sistem pengawasan yang menangani hubungan antara pemilik saham, direktur perusahaan, kreditur, instansi pemerintah, pegawai, dan pihak-pihak lain yang terkait, baik internal maupun eksternal dalam konteks hak dan kewajiban masing-masing (Nur'aini & Sherlita, 2023).

Dalam penelitian ini untuk mengukur variabel *corporate governance* dengan menggunakan proporsi dewan komisaris independen. Keberadaan komisaris independen berperan dalam mencegah terjadinya praktik penghindaran pajak. Dengan adanya *corporate governance*, kegiatan operasional perusahaan bisa berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan, karena sistem ini berperan sebagai pengawas kinerja manajemen agar pelaksanaan tata kelola

perusahaan tetap dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Wardani & Dawa, 2022). Berdasarkan pada penjelasan yang telah diuraikan, maka model pemikiran untuk penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Keterangan :

X : Variabel independen

Y : Variabel dependen

Z : Variabel moderasi

2.4. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2022), hipotesis merupakan suatu anggapan sementara mengenai rumusan masalah penelitian yang disusun dalam bentuk pernyataan. Dikatakan bersifat sementara karena jawabannya masih bersumber dari data teoritis yang relevan dan belum didukung oleh data empiris yang diperoleh

melalui penelitian. Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁ : Diduga *Capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Basic Materials* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024.

H₂ : Diduga *Transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Basic Materials* yang terdaftar di BEI 2021-2024.

H₃ : Diduga *Corporate governance* mampu memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Basic Materials* yang terdaftar di BEI 2021-2024.

H₄ : Diduga *Corporate governance* mampu memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Basic Materials* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024.

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2022), menyatakan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang didasari oleh landasan berpikir empiris dan objektif, diterapkan untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu, melibatkan analisis data statistik, dan bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena dan menguji hipotesis yang telah ditentukan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan asosiatif. Menurut Sugiyono (2022), pendekatan asosiatif didefinisikan sebagai pernyataan masalah dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta untuk mengetahui peran variabel moderasi dalam memperkuat atau melemahkan hubungan variabel dalam penelitian ini yaitu *capital intensity* dan *transfer pricing* sebagai variabel independen terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance* dengan *corporate governance* yang diproksikan oleh dewan komisaris independen sebagai variabel moderasi.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan *Basic Materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2024, untuk memudahkan akses terhadap laporan keuangan tahunan melalui situs www.idx.go.id serta laman resmi

perusahaan masing-masing. ³⁶ Pemilihan sektor ini didasarkan pada karakteristiknya yang memiliki tingkat investasi aset tetap yang tinggi, serta kemungkinan adanya *transfer pricing* sehingga dianggap relevan untuk dikaji dalam konteks penghindaran pajak. Pelaksanaan penelitian direncanakan berlangsung dalam rentang waktu beberapa bulan, dimulai setelah proposal dinyatakan layak dan berlanjut hingga proses analisis data dan penyusunan hasil penelitian selesai.

³ 3.3. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2022), populasi merupakan seluruh unsur yang dijadikan sebagai area atau objek generalisasi dalam penelitian. Unsur populasi mencakup seluruh subjek yang akan diukur dan merupakan satuan yang menjadi fokus penelitian. ⁵ Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor *Basic Materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021-2024.

Menurut Sugiyono (2022), ¹ sampel merupakan sebagian dari populasi yang memiliki ciri atau karakteristik yang sama oleh populasi tersebut. Metode ⁴⁴ pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. ¹ Adapun kriteria penentuan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan yang termasuk dalam sektor *Basic Materials* dan terdaftar secara konsisten di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian 2021-2024
2. Perusahaan yang berturut-turut mempublikasikan laporan tahunan (*annual*

report) dan laporan keuangan secara lengkap selama periode 2021-2024

3. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian berturut-turut tahun 2021-2024

4. Perusahaan yang menyajikan laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan dalam mata uang rupiah (IDR) selama tahun 2021-2024

5. Perusahaan yang menyajikan data lengkap terkait dengan variabel *capital intensity*, *transfer pricing*, *tax avoidance*, serta *corporate governance* pada laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan selama tahun 2021-2024

3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.4.1. Variabel Independen (X)

3.4.1.1. *Capital Intensity* (X₁)

Capital intensity merupakan suatu kegiatan investasi perusahaan yang diwujudkan dalam bentuk aset tetap, yang umumnya diukur dengan menggunakan rasio antara total aset tetap terhadap total aset perusahaan (Murniati & Sovita, 2022). Semakin tinggi rasio tersebut, semakin menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat ketergantungan yang besar terhadap aset tetap dalam mendukung aktivitas operasional. Artinya, investasi perusahaan lebih banyak teralokasikan pada aset jangka panjang yang digunakan secara terus menerus dalam proses produksi maupun penyediaan jasa (Wahyuni, 2024). Rumus yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pengukuran yang sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Santo & Nastiti (2023), yakni sebagai berikut:

$$Capital\ intensity = \frac{Total\ fixed\ asset}{Total\ asset}$$

3.4.1.2. *Transfer Pricing* (X₂)

Menurut Apriani (2025), *transfer pricing* didefinisikan sebagai metode penentuan ³⁹ harga dalam transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau terafiliasi. Perusahaan yang melakukan *transfer pricing* memiliki kebebasan dalam memilih prinsip yang dianggap paling sesuai dengan kondisi suatu perusahaan (Haztania & Lestari, 2023).

Di Indonesia, regulasi mengenai *transfer pricing* ³⁹ telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.03/2016 yang mewajibkan setiap perusahaan menyusun dokumentasi *transfer pricing* guna meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Rumus untuk menghitung *transfer pricing* ² yang digunakan dalam penelitian ini sejalan dengan Pramita & Susanti (2023), yakni sebagai berikut:

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang pihak berelasi}}{\text{Total piutang}}$$

⁷⁷ 3.4.2. Variabel Dependen (Y)

3.4.2.1. *Tax Avoidance*

Penghindaran ¹ pajak (*tax avoidance*) merupakan strategi manajemen pajak yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah atau ketidaktegasan peraturan perpajakan untuk mengurangi beban pajak perusahaan (Ghozali, 2021b). ⁸³ *Effective Tax Rate* (ETR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat penghindaran pajak pada perusahaan. Rasio ini didapatkan dari perbandingan antara total ²² beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Dimana semakin rendah nilai ETR maka hal ini menunjukkan perusahaan

mempunyai potensi penghindaran pajak yang lebih besar, sedangkan semakin tinggi nilai ETR menunjukkan perusahaan berpotensi melakukan penghindaran pajak relatif rendah (Astuti dalam Ishak & Asalam, 2023).

Adapun rumus yang digunakan ²⁰ untuk mengukur *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan rumus yang sejalan dengan penelitian (Ghozali, 2021b) adalah sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Total beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

3.4.3. Variabel Moderasi (Z)

3.4.3.1. Corporate Governance

Menurut Arviani & Setyawati (2025), *corporate governance* didefinisikan sebagai sistem ⁵ tata kelola perusahaan yang menggambarkan hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan untuk menentukan arah serta kinerja perusahaan. Dalam penelitian ini pengukuran variabel *corporate governance* dilakukan dengan ¹⁰⁰ menggunakan proporsi dewan komisaris independen. Peran dewan komisaris dalam suatu perusahaan terutama berfokus pada suatu kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh direksi. Keberadaan dewan komisaris diharapkan mampu mengurangi potensi konflik keagenan yang dapat muncul antar direksi dan pemegang saham pada perusahaan (Sari, 2021).

Rumus ¹⁰⁹ yang digunakan untuk melakukan pengukuran *corporate governance* ⁴⁴ dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ghozali (2021), yakni sebagai berikut:

$$\text{Dewan komisaris independen} = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Total anggota dewan komisaris}}$$

3.5. Pengumpulan Data

¹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak perusahaan, melainkan dari dokumen dan sumber resmi yang telah dipublikasikan oleh suatu perusahaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dari laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan pada perusahaan *Basic Materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2024. Sumber data penelitian ini diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) serta laman resmi dari masing-masing perusahaan. Selain itu peneliti juga memanfaatkan sumber tambahan seperti, literatur akademik, buku akuntansi dan perpajakan, serta jurnal-jurnal yang relevan untuk memperkuat landasan teori dan hasil pembahasan.

¹ Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu dengan cara menelusuri, mengunduh, dan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan-tahapan. Pertama, peneliti mengidentifikasi perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024. Kedua, peneliti mengunduh laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan dari situs BEI atau laman resmi perusahaan. Ketiga, data yang telah diperoleh kemudian diseleksi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, selanjutnya

data disusun dalam bentuk tabel agar mempermudah dalam proses analisis.

47

3.6. Analisis Data

3.6.1. Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2022), statistik deskriptif didefinisikan sebagai jenis statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan data yang diperoleh apa adanya, tanpa bertujuan untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum atau melakukan generalisasi. Statistik deskriptif mencakup berbagai cara penyajian data, seperti tabel, grafik, diagram, lingkaran, *pictogram*, perhitungan *modus*, *median*, dan *mean*, perhitungan desil, persentil, ukuran penyebaran data melalui rata-rata dan standar deviasi, serta persentase.

1

3.6.2. Uji Asumsi Klasik

Menurut Iba & Wardhana (2024), uji asumsi klasik didefinisikan sebagai serangkaian pengujian dalam analisis data kuantitatif yang memiliki tujuan untuk dapat memastikan bahwa hasil analisis statistik dinyatakan *valid* dan hasil ini dapat diandalkan.

8

3.6.2.1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali & Kusumadewi (2023), uji normalitas merupakan salah satu langkah penting dalam analisis regresi yang bertujuan untuk mengetahui apakah data residual pada model regresi terdistribusi normal. Asumsi normalitas residual sangat penting karena menjadi dasar bagi validitas uji statistik seperti uji t dan uji F. Kedua uji tersebut mengasumsikan bahwa nilai residual menyebar secara normal disekitar nilai rata-rata nol. Apabila asumsi normalitas ini tidak terpenuhi, maka hasil uji statistik dapat menjadi tidak akurat terutama pada ukuran

sampel yang kecil. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kesimpulan yang diambil dari hasil regresi menjadi bias atau menyesatkan.

Cara⁶⁰ untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik biasanya dilakukan dengan melihat bentuk sebaran data⁹ melalui *histogram*, *normal probability plot* (P-P Plot), atau Q-Q Plot. Sementara itu, uji statistik⁵¹ dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) atau *Shapiro Wilk* yang memberikan hasil signifikansi untuk menilai normalitas secara lebih objektif.

Pengujian *Kolmogorov-Smirnov* digunakan karena memberikan ukuran objektif terhadap normalitas data, terutama pada penelitian yang ukuran sampel cukup besar. Interpretasi hasil uji K-S⁹ didasarkan pada nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* atau nilai signifikansi yang dihasilkan dari pengujian, yakni sebagai berikut (Ghozali & Kusumadewi, 2023):

- 32 Apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* < 0,05 maka H_0 ditolak, artinya data residual terdistribusi tidak normal.
- Apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0,05 maka H_0 tidak ditolak, artinya data residual terdistribusi normal

3.6.2.2. Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali & Kusumadewi (2023), uji multikolonieritas⁸⁹ digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya bebas dari multikolonieritas agar hasil estimasi menjadi akurat dan tidak bias. Jika antar¹¹³

variabel bebas saling berkorelasi kuat, maka kemampuan masing-masing variabel dalam menjelaskan variabel dependen menjadi sulit diinterpretasikan.

Pendeteksian multikolonieritas dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain:

1. Melihat nilai R^2 yang tinggi disertai banyak variabel independen tidak signifikan.
2. Menganalisis matriks kolerasi antar variabel bebas, dimana kolerasi di atas 0,90 mengindikasikan adanya multikolonieritas.
3. Menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan batas toleransi VIF > 10 atau *Tolerance* < 0,10 sebagai indikasi terjadinya multikolonieritas.

Jika ditemukan multikolonieritas, peneliti dapat mengatasinya dengan menghapus salah satu variabel yang berkorelasi tinggi, melakukan transformasi data, atau menggunakan metode analisis alternatif yang mampu mengurangi pengaruh korelasi antar variabel bebas.

3.6.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghazali & Kusumadewi (2023), uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Model regresi yang baik menunjukkan kondisi homoskedastisitas, yaitu varians residual yang konstan.

Sebaliknya, jika varians residual berbeda-beda antar pengamatan, maka terjadi heteroskedstisitas, yang dapat menyebabkan hasil estimasi menjadi tidak efisien.

Ada beberapa metode pengujian yang bisa digunakan, yaitu grafik *scatterplot* dan uji glejser.

- a. Pengujian heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik plot antara

nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dan residualnya (SRESID). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas, dapat diamati pola yang terbentuk³³ pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED, dimana sumbu Y menunjukkan nilai yang telah diprediksi, sedangkan sumbu X menunjukkan residual (selisih antara nilai prediksi dan nilai aktual) yang telah di-*studentized*. Dasar analisis:

1. Apabila terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola teratur (misalnya bergelombang, melebar lalu menyempit), maka hal tersebut mengindikasikan adanya heterokedastisitas.
2. Apabila tidak terdapat pola yang jelas dan titik-titik menyebar secara acak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas atau kondisi tersebut disebut homokedastisitas.

¹⁷
b. Dasar pengambilan keputusan untuk uji heteroskedastisitas dengan uji glejser adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas.

3.6.2.4. Uji Autokorelasi

¹
Menurut Ghozali & Kusumadewi (2023), uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau korelasi antara kesalahan (residual) pada periode satu dengan periode sebelumnya dalam model regresi. Autokorelasi muncul ketika residual dari satu observasi saling berhubungan dengan observasi

lainnya secara berurutan dalam deret waktu (*time series*).

Dalam pengujian mengalami autokorelasi mengindikasikan bahwa gangguan (*error*) yang terjadi pada satu periode dapat mempengaruhi periode berikutnya. Pada data *cross-section* (silang waktu), autokorelasi jarang terjadi karena setiap observasi berasal dari individu atau kelompok yang berbeda. Namun dalam data *time series*, autokorelasi perlu diuji karena observasi yang saling berurutan berpotensi menimbulkan pola hubungan residual. Salah satu metode umum yang digunakan untuk mendeteksi korelasi adalah Uji Durbin-Watson (DW *Test*), yang mengukur autokorelasi tingkat pertama dengan asumsi adanya konstanta pada model regresi.

Tabel 3.1 Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < DW$
Tidak ada autokorelasi positif	<i>No desicion</i>	$dl \leq DW \leq du$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - dl < DW < 4$
Tidak ada korelasi negatif	<i>No decision</i>	$4 - du \leq DW \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tidak ditolak	$Du < DW < 4 - du$

Sumber: Ghazali & Kusumadewi (2023)

3.6.3. Uji Hipotesis

3.6.3.1. Uji Analisis Regresi Berganda

Menurut Sugiyono (2018), analisis regresi berganda digunakan ketika peneliti bertujuan untuk memprediksi perubahan variabel dependen berdasarkan variasi dua atau lebih variabel independen yang berperan sebagai prediktor. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengetahui bagaimana perubahan nilai variabel independen, baik secara simultan maupun parsial, memengaruhi naik atau

turunnya variabel dependen.

Oleh karena itu, analisis regresi berganda diterapkan jika jumlah variabel independen yang digunakan dalam penelitian minimal terdiri atas dua variabel. Untuk menguji pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat, berikut model sistematis yang digunakan dalam penelitian, sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = *Tax Avoidance*

α = Konstanta

b_1, b_2, b_3 = Koefisien Regresi

X_1 = *Capital Intensity*

X_2 = *Transfer Pricing*

ε = *Error*

3.6.3.2. Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Sugiarto & Salim (2025), koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar proporsi variasi variabel dependen (Y) yang dapat dijelaskan oleh seluruh variabel independen ($X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$) dalam model regresi secara bersama-sama. Nilai R^2 menunjukkan tingkat kemampuan model dalam menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.

Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1, jika R^2 mendekati 1, berarti model memiliki kemampuan prediksi yang tinggi karena sebagian besar variasi Y dapat dijelaskan oleh variabel X . Namun, penambahan variabel bebas cenderung

meningkatkan nilai R^2 meskipun tidak semua variabel memberikan pengaruh signifikan. Oleh karena itu, digunakan *Adjusted R²* (R^2 yang disesuaikan) untuk memberikan hasil yang lebih akurat, karena memperhitungkan jumlah variabel dan ukuran sampel. *Adjusted R²* tidak selalu meningkat saat variabel baru ditambahkan, sehingga lebih tepat digunakan untuk mengevaluasi model regresi berganda.

3.6.3.3. Uji Parsial (Uji t)

Menurut Kusumah (2024), uji t digunakan untuk mengetahui masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah. Artinya, setiap variabel bebas diuji satu persatu untuk mengetahui apakah memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Nilai uji ini dapat dilihat pada tabel *coefficients*. Secara teknis, pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai *t-statistic* dengan *t-tabel* melalui nilai *t-statistic* atau nilai signifikansi (*Sig.*). Jika nilai *t-statistic* lebih besar dari *t-tabel* (misalnya 1,96) atau jika nilai signifikansi $\leq 0,05$, maka hipotesis nilai alternatif (H_1) diterima dan hipotesis nol (H_0) ditolak. Sebaliknya, jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima. Maka dapat disimpulkan:

3.6.3.4. Uji Simultan (Uji F)

Menurut Kusumah (2024), uji F berfungsi untuk menguji pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau bersama-sama dalam satu model regresi. Dengan kata lain, uji ini membantu menilai sejauh mana variabel bebas secara kolektif mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel terikat. Nilai F dapat dilihat pada tabel ANOVA dalam *output* analisis

regresi, apabila nilai signifikansi ($F \text{ Sig.}$) $\leq 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan layak untuk digunakan dalam analisis, karena secara keseluruhan variabel bebas memberikan kontribusi nyata terhadap variabel terikat. Adapun penerimaan dan penolakan hipotesis telah ditentukan berdasarkan kriteria, sebagai berikut (Ghozali, 2021a):

1. Apabila nilai $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$, maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Apabila nilai $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$, maka hipotesis ditolak. Artinya, secara parsial variabel independen tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.6.4. Analisis Regresi Moderasi

Menurut Jufrizen (2024) analisis regresi moderasi atau *Moderated Regression Analysis* (MRA) merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menguji peran variabel moderasi dalam mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam penelitian ini, metode MRA digunakan untuk mengetahui apakah *corporate goveranance* dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh *capital intensity* dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Adapun model persamaan analisis dapat dituliskan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z + \beta_4 (X_1 Z) + \beta_5 (X_2 Z) + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = ³² *Tax Avoidance*

α = Konstanta

X_1 = *Capital Intensity*

X_2 = *Transfer Pricing*

Z = *Corporate Governance* (variabel moderasi)

X_1Z = ⁴ Interaksi antara *capital intensity* dengan *corporate governance*

X_2Z = Interaksi antara *transfer pricing* dengan *corporate governance*

b_1, b_2, b_3, b_4, b_5 = Koefisien regresi berganda

ε = *Error*

BAB IV

HASIL ¹⁰¹ DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Penelitian

4.1.1. Bursa Efek Indonesia (BEI)

Perkembangan pasar modal atau bursa efek di Indonesia telah dimulai sejak masa penjajahan belanda. Pada tanggal 14 Desember 1912, pemerintah hindia belanda melalui *Amsterdamse Effectenbeurs* (bursa efek Amsterdam) membuka cabang bursa efek di Batavia yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Bursa tersebut diberi nama *Vereniging voor de effectenhandel*. Jika dibandingkan dengan negara lain di Asia, bursa efek Batavia termasuk salah satu yang tertua, yaitu berada di urutan keempat setelah bursa di Bombay, Hong Kong, dan Tokyo.

Pembentukan bursa tersebut bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan berbagai efek, seperti saham dan obligasi milik perusahaan serta perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia. Selain itu, diperdagangkan pula obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah seperti provinsi dan kotapraja, sertifikat saham perusahaan Amerika yang administrasinya dilakukan di Belanda, serta berbagai efek dari perusahaan Belanda lainnya.

Perkembangan pasar modal pada masa tersebut mengalami pertumbuhan yang cukup pesat sehingga menarik minat masyarakat di berbagai kota. Tingginya antusiasme masyarakat terhadap aktivitas pasar modal mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk memperluas jaringan bursa dengan mendirikan bursa cabang di ⁸² Surabaya pada 11 Januari 1925 serta di Semarang pada 1 Agustus 1925.

Perkembangan pasar modal di Indonesia mulai mengalami hambatan pada tahun 1939 akibat meningkatnya ketegangan politik di Eropa. Kondisi tersebut mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk memusatkan perdagangan efek di Batavia serta menutup bursa efek di Surabaya dan Semarang. Selanjutnya, pada 17 Mei 1940 seluruh aktivitas perdagangan efek diberhentikan dan pemerintah mewajibkan penyimpanan semua efek di bank yang ditunjuk. Peristiwa Perang Dunia II menandai berakhirnya aktivitas pasar modal pada masa penjajahan Belanda.

Pasar modal kemudian diaktifkan kembali pada 10 Agustus 1977 melalui keputusan presiden No. 52 tahun 1976. Aktivitas ini ditandai dengan penawaran saham perdana perusahaan PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama. Meskipun demikian, pada periode 1977-1987 pasar modal masih relatif kurang berkembang hingga pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan deregulasi pada tahun 1987 dan 1988 untuk mendorong pertumbuhan pasar modal.

Pada tahun 2007, Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta resmi bergabung menjadi Bursa Efek Indonesia. Penggabungan ini memberikan dampak positif terhadap perkembangan pasar saham yang tercermin pada peningkatan Indeks Harga Saham Gabungan, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2008 akibat krisis ekonomi global. Setelah itu, pasar modal Indonesia kembali menunjukkan pertumbuhan yang signifikan pada tahun-tahun berikutnya.

Untuk mendukung pengembangan pasar modal, BEI terus melakukan berbagai inovasi seperti peluncuran sistem perdagangan JATS-NextG pada tahun 2009, pendirian *The Indonesia Capital Market Institute* pada tahun 2010, serta

pengembangan pusat edukasi melalui Galeri BEI. Berbagai langkah tersebut dilakukan guna meningkatkan efisiensi pasar, memperkuat perlindungan investor, dan mendorong pertumbuhan pasar modal di Indonesia agar semakin kompetitif di tingkat global.

4

Adapun visi dan misi dari Bursa Efek Indonesia adalah sebagai berikut:

52

- 1) Visi : Menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia
- 2) Misi : Menciptakan infrastruktur pasar keuangan yang terpercaya dan kredibel untuk mewujudkan pasar yang teratur, wajar, dan efisien serta dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan melalui produk dan layanan yang inovatif

4.1.2. Objek Penelitian

25

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor *Basic Materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun penelitian mencakup 4 tahun, yaitu dari tahun 2021 sampai dengan 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan perusahaan sektor *Basic Materials*. Data penelitian diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia di www.idx.co.id serta website resmi dari masing-masing perusahaan. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis secara kuantitatif untuk menggambarkan karakteristik dan kondisi variabel penelitian berdasarkan data numerik yang tersedia. Pada proses pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *software* SPSS versi 25 sebagai alat bantu analisis statistik. Pemilihan sampel penelitian dilakukan berdasarkan kriteria

88

41

tertentu, sehingga diperoleh sejumlah perusahaan yang telah memenuhi syarat sebagai sampel penelitian dan disajikan dalam tabel 4.1, yakni sebagai berikut:

Tabel 4.1 Daftar Nama Perusahaan Sampel

No	Kode	Nama Perusahaan	Sektor
1	AGII	Samator Indo Gas Tbk.	Barang Kimia
2	ANTM	Aneka Tambang Tbk.	Logam dan Mineral
3	AVIA	Avia Avian Tbk.	Barang Kimia
4	CITA	Cita Mineral Investindo Tbk.	Logam dan Mineral
5	CLPI	Colorpak Indonesia Tbk.	Barang Kimia
6	EKAD	Ekadharma International Tbk.	Barang Kimia
7	IFII	Indonesia Fibreboard Industry	Perhutanan dan Kertas
8	IFSH	Ifishdeco Tbk.	Logam dan Mineral
9	INTP	Indocement Tunggal Prakarsa Tb	Material Konstruksi
10	ISSP	Steel Pipe Industry of Indonesia	Logam dan Mineral
11	LTLS	Lautan Luas Tbk.	Barang Kimia
12	MDKI	Emdeki Utama Tbk.	Barang Kimia
13	PBID	Panca Budi Idaman Tbk.	Wadah dan Kemasan
14	PNGO	Pinago Utama Tbk	Produk Makanan Pertanian
15	SAMF	Saraswanti Anugerah Makmur Tbk	Barang Kimia
16	SMBR	Semen Baturaja Tbk.	Material Konstruksi
17	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.	Material Konstruksi
18	SRSN	Indo Acidatama Tbk	Barang Kimia
19	WTON	Wijaya Karya Beton Tbk.	Material Konstruksi

Sumber: www.idx.co.id

Berdasarkan hasil penentuan sampel yang telah di uraikan pada BAB III, diperoleh sebanyak 19 perusahaan yang dijadikan sebagai objek penelitian. Rincian nama perusahaan tersebut disajikan pada tabel 4.1, penelitian ini mencakup periode pengamatan selama empat tahun, yaitu 2021-2024, sehingga total data observasi yang digunakan berjumlah 76 sampel, yang berasal dari hasil perkalian antara jumlah perusahaan sampel dengan periode penelitian. Jumlah observasi tersebut dinilai cukup untuk mendukung proses analisis dalam penelitian ini.

4.2. Hasil Uji Analisis Data Penelitian

4.2.1. Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.2 yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa jumlah observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 60 data untuk masing-masing variabel yang akan dilakukan penelitian. Pada variabel *capital intensity* (LAG_X1) memiliki nilai minimum sebesar 0,015 dan nilai maximum sebesar 0,864, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,41568 serta standar deviasi sebesar 0,188683. Variabel *transfer pricing* (LAG_X2) memiliki nilai minimum sebesar -0,099 dan nilai maximum sebesar 0,875, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,15650 serta standar deviasi sebesar 0,262901.

Selanjutnya, pada variabel *tax avoidance* (LAG_Y) memiliki nilai minimum sebesar 0,115 dan nilai maximum sebesar 0,270 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,17879 serta standar deviasi sebesar 0,030052. Selanjutnya, variabel *corporate governance* (LAG_Z) memiliki nilai minimum 0,194 dan nilai maximum sebesar 0,640, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,35817 serta standar deviasi sebesar 0,101155.

Tabel 4.2 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LAG_X1	60	,015	,864	,41568	,188683
LAG_X2	60	-,099	,875	,15650	,262901
LAG_Y	60	,115	,270	,17879	,030052
LAG_Z	60	,194	,640	,35817	,101155
Valid N (listwise)	60				

Sumber: Pengolahan Data SPSS 25, 2026

29

4.2.2. Uji Asumsi klasik

4.2.2.1. Uji Normalitas

1

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas Sebelum Data Terdistribusi Normal

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		76
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	17,67298932
Most Extreme Differences	Absolute	,375
	Positive	,375
	Negative	-,269
Test Statistic		,375
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Pengolahan Data SPSS 25, 2026

Berdasarkan tabel 4.3 dalam pengujian Kolmogorov-Smirnov awal, diperoleh jumlah sampel (N) sebanyak 76 dengan nilai *test statistic* sebesar 0,375 serta nilai signifikansi atau *Asymp.Sig.(2-tailed)* sebesar 0,000. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji ini adalah apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka residual berdistribusi normal, sedangkan apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka residual tidak berdistribusi normal. Dengan demikian, hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *Asymp.Sig.(2-tailed)* sebesar 0,000 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual dalam model regresi tidak berdistribusi normal. Hal ini mengindikasikan bahwa asumsi normalitas belum terpenuhi, sehingga diperlukan langkah penyesuaian, yaitu dengan mengidentifikasi dan menghapus data *outlier* yang mempengaruhi distribusi

data, agar residual dapat mendekati asumsi klasik yang dipersyaratkan.

Setelah dilakukan penyesuaian data melalui penghapusan *outlier*, pengujian normalitas kembali dilakukan dengan menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov* guna mengevaluasi apakah residual pada model regresi telah memenuhi asumsi distribusi normal.

21

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas Setelah Data Terdistribusi Normal

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,02779813
Most Extreme Differences	Absolute	,085
	Positive	,085
	Negative	-,069
Test Statistic		,085
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

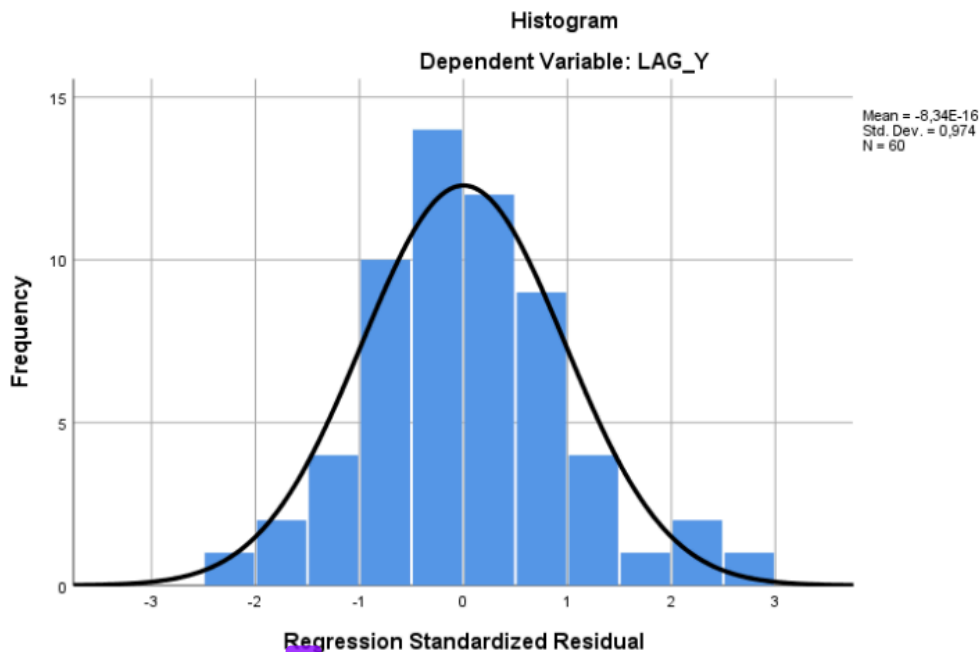
c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Pengolahan Data SPSS 25, 2026

Berdasarkan hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* pada tabel 4.4, diperoleh jumlah sampel (N) sebanyak 60 dengan nilai *mean* residual sebesar 0,0000000 menunjukkan bahwa rata-rata residual berada di sekitar nol, sedangkan standar deviasi sebesar 0,02779813 yang mencerminkan tingkat penyebaran residual yang relatif kecil serta nilai *test statistic* sebesar 0,085. Mengacu pada kriteria pengambilan keputusan dalam uji normalitas, residual dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi atau *Asymp.Sig.(2-tailed)* lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi atau *Asymp.Sig.(2-tailed)*

sebesar $0,200 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual dalam model regresi telah berdistribusi normal dalam penelitian ini.

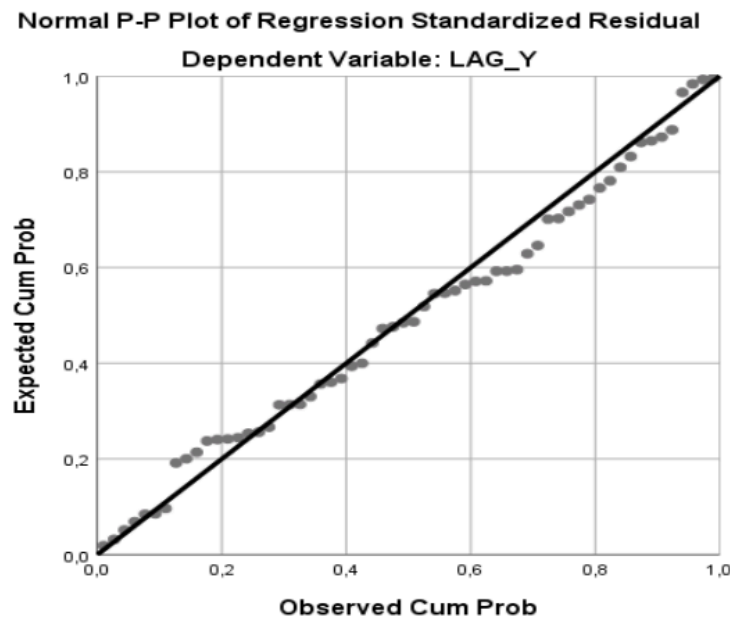


Gambar 4.1 Grafik Histogram

Sumber: Pengolahan Data SPSS 25, 2026

Selain menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*, pengujian normalitas juga dapat dianalisis melalui *normal probability plot* (P-P PLOT) dan grafik *histogram* untuk memperkuat hasil pengujian statistik. Berdasarkan pada gambar 4.1 grafik *histogram*, dapat dilihat bahwa distribusi data residual membentuk pola yang mendekati kurva normal atau kurva yang menyerupai lonceng (*bell-shaped curve*), sebaran data terlihat terpusat di sekitar nilai rata-rata yang mendekati nol. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar nilai residual terkonsentrasi di bagian tengah distribusi dan secara bertahap menurun pada sisi kiri dan kanan kurva. Pola distribusi yang simetris ini mengindikasikan bahwa data residual telah berdistribusi normal. Tidak terlihat adanya *asimetri* (*skewness*) yang signifikan

ataupun pola distribusi yang menyimpang secara ekstrem. Sehingga ¹³ dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas dalam model regresi telah terpenuhi.



Gambar 4.2 Normal Probability Plot (P-P PLOT)

¹³ Sumber: Pengolahan Data SPSS 25, 2026

Selain itu, ²⁴ hasil pengamatan pada gambar 4.2 normal probability plot (P-P PLOT), dapat diketahui bahwa titik-titik residual cenderung berada di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut. Meskipun terdapat sedikit penyimpangan pada beberapa titik, namun secara keseluruhan tidak menunjukkan penyimpangan yang berarti. Hal ini mengindikasikan bahwa data residual berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas dinyatakan terpenuhi.

Berdasarkan kesesuaian antara ⁹ hasil uji Kolmogorov-Smirnov, Grafik ⁷ Histogram, dan Normal Probability Plot (P-P PLOT), maka dapat disimpulkan bahwa data residual telah berdistribusi normal baik secara statistik maupun secara visual. ⁹⁷ Dengan demikian, asumsi normalitas telah terpenuhi dengan model regresi

layak untuk dilanjutkan.

4.2.2.2. Uji Multikolinieritas

18

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinieritas

		Coefficients ^a						
		Unstandardized		Standardized				
		Coefficients		Coefficients				
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
							Tolerance	VIF
1	(Constant)	,165	,017		9,743	,000		
	LAG_X1	-,011	,021	-,066	-,495	,623	,853	1,172
	LAG_X2	,046	,015	,400	2,983	,004	,850	1,176
	LAG_Z	,029	,037	,099	,789	,433	,970	1,031

13
a. Dependent Variable: LAG_Y

Sumber: Pengolahan Data SPSS 25, 2026

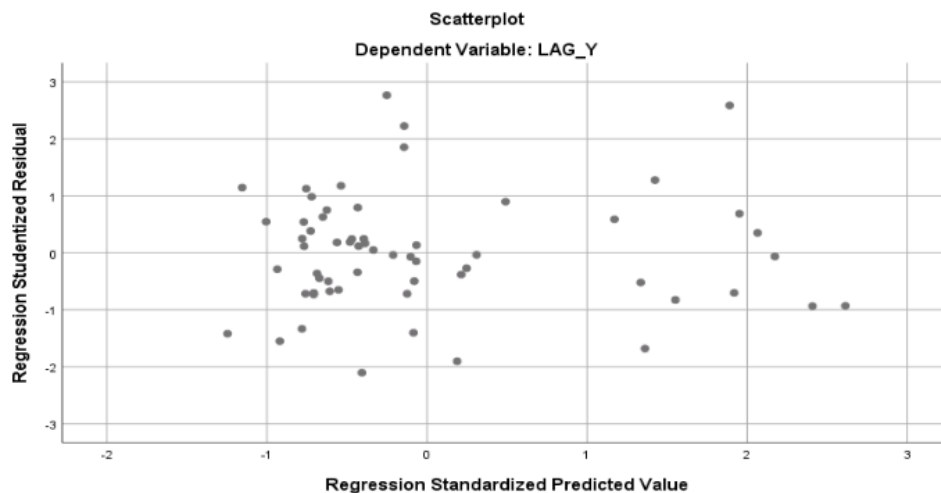
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.5, dapat diketahui bahwa nilai *Tolerance* dari variabel *capital intensity* (LAG_X1) sebesar $0,853 > 0,10$, *transfer pricing* (LAG_X2) sebesar $0,850 > 0,10$, dan *corporate governance* (LAG_Z) sebesar $0,970 > 0,10$, hal ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen memiliki tingkat korelasi yang rendah dengan variabel independen lainnya. Selain itu, nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk variabel *capital intensity* (LAG_X1) sebesar $1,172 < 10$, *transfer pricing* (LAG_X2) $1,176 < 10$, dan *corporate governance* (LAG_Z) $1,031 < 10$, sehingga mengindikasikan tidak adanya peningkatan *varians* yang disebabkan oleh hubungan linear antar variabel independen.

70

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi, sehingga model terbebas dari gejala multikolonieritas. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel independen memiliki kontribusi informasi yang berbeda dalam menjelaskan

variabel dependen, sehingga model layak digunakan untuk analisis lebih lanjut dalam menjelaskan *tax avoidance*.

4.2.2.3. Uji Heterokedastisitas



Gambar 4.3 Hasil Uji Heterokedastisitas Menggunakan Scatterplot

Sumber: Pengolahan Data SPSS 25, 2026

Pengujian heterokedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *scatterplot* dan uji Glejser untuk memastikan apakah terjadi ketidaksamaan varians residual dalam model regresi. Berdasarkan gambar 4.3 pada pengujian heterokedastisitas dengan menggunakan metode *scatterplot*, dapat diketahui bahwa grafik *scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik residual tersebar secara acak disekitar garis nol pada sumbu Y, baik pada sisi positif maupun negatif, serta tidak menunjukkan pola tertentu yang sistematis. Penyebaran titik tidak membentuk pola tertentu, seperti penyempitan, pelebaran, maupun gelombang mengindikasikan bahwa varians residual bersifat relatif konstan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

Tabel 4.6 Hasil Uji Heterokedastisitas Menggunakan Metode Glejser

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	,006	,011		,526	,601
	LAG_X1	,016	,013	,173	1,224	,226
	LAG_X2	,003	,010	,038	,271	,787
	LAG_Z	,023	,023	,130	,983	,330

a. Dependent Variable: ABS_RES1

Sumber: Pengolahan Data SPSS 25, 2026

Untuk memperkuat hasil penelitian tersebut, maka dilakukan pengujian lanjutan dengan menggunakan metode Glejser. Berdasarkan pada tabel 4.6, hasil Uji Glejser menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk masing-masing variabel yaitu LAG_X1 sebesar 0,226, LAG_X2 sebesar 0,787, dan LAG_Z sebesar 0,330, yang seluruhnya lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap nilai absolut residual. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini setelah dilakukan pengujian dengan metode Scatterplot dan Uji Glejser tidak mengalami gejala heterokedastisitas.

4.2.2.4. Uji Autokorelasi

Berdasarkan pada tabel 4.7, diperoleh nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,624. Pengujian autokorelasi dengan metode Durbin-Watson dilakukan dengan membandingkan nilai DW terhadap batas bawah (dL) dan batas atas (dU). Suatu model dinyatakan tidak mengalami autokorelasi apabila nilai DW berada di antara dU dan $(4 - dU)$. Nilai tersebut selanjutnya dibandingkan dengan nilai tabel Durbin-Watson pada tingkat signifikansi 5% dengan rumus $(k; N)$. Jumlah

variabel independen dalam model penelitian ini adalah 3 ($k = 3$), sedangkan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 60 ($N = 60$), sehingga rumus yang digunakan adalah (3; 60).

Berdasarkan angka tersebut kemudian dapat dilihat dari tabel distribusi Durbin-Watson (d), maka diperoleh nilai $dL = 1,4797$ dan $dU = 1,6889$. Nilai Durbin-Watson (d) sebesar 1,624 berada diatas nilai batas bawah (dL) sebesar 1,4797 namun masih berada dibawah nilai batas atas (dU) sebesar 1,6889. Dengan demikian, nilai durbin-watson berada pada interval $dL \leq d \leq dU$ ($1,4797 \leq 1,624 \leq 1,6889$), sehingga hasil pengujian berada pada kategori *No decision* (ragu-ragu) maka tidak dapat disimpulkan secara pasti ada atau tidaknya autokorelasi pada model regresi.

Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi Sebelum Perbaikan

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,384 ^a	,147	,103	,028787	1,624

a. Predictors: (Constant), corporate governance, capital intensity, transfer pricing

b. Dependent Variable: tax avoidance

Sumber: Pengolahan Data SPSS 25, 2026

Setelah dilakukan perbaikan model regresi menggunakan metode *Cochrane Orcutt* pada tabel 4.8, nilai Durbin-Watson meningkat menjadi 2,021. Berdasarkan nilai tabel distribusi Durbin-Watson pada tingkat signifikansi 5% dengan rumus ($k; N$) = (3; 60), maka nilai Durbin-Watson lebih besar dari nilai dU sebesar 1,6889 dan kurang dari nilai $4 - dU$ sebesar 2,2311. Karena nilai durbin-watson berada pada interval $dU < d < 4 - dU$ ($1,7671 < 2,021 < 4 -$

2,2311), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami autokorelasi.

Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi Setelah Perbaikan

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,380 ^a	,144	,099	,028533	2,021

a. Predictors: (Constant), LAG_Z, LAG_X1, LAG_X2

b. Dependent Variable: LAG_Y

Sumber: Pengolahan Data SPSS 25, 2026

4.2.3. Uji Hipotesis

4.2.3.1. Koefisien Determinasi

Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,367 ^a	,135	,104	,028438

a. Predictors: (Constant), LAG_X2, LAG_X1

Sumber: Pengolahan Data SPSS 25, 2026

Berdasarkan tabel 4.9 pengujian koefisien determinasi diatas, diperoleh nilai R^2 sebesar 0,135. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 13,5%. Dengan demikian, sebesar 86,5% variasi variabel dependen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukan ke dalam model penelitian. Nilai $Adjusted R^2$ sebesar 0,104 mengindikasikan bahwa setelah dilakukan penyesuaian terhadap jumlah variabel dan sampel penelitian, kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen menjadi sebesar 10,4%.

Selain itu, diperoleh nilai *Std. Error of the Estimate* sebesar 0,028438, yang menunjukkan tingkat kesalahan prediksi model dalam mengestimasi nilai variabel dependen. Nilai yang relatif kecil ini mengindikasikan bahwa penyimpangan antara nilai aktual dan hasil prediksi tidak terlalu besar, sehingga masih dapat digunakan meskipun memiliki kemampuan penjelasan yang terbatas.

4.2.3.2. Analisis Regresi Berganda

Tabel 4.10 Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	,177	,009		,000
	LAG_X1	-,012	,021	-,076	,572
	LAG_X2	,044	,015	,389	,005

a. Dependent Variable: LAG_Y

Sumber: Pengolahan Data SPSS 25, 2026

Berdasarkan dari hasil pengujian analisis regresi berganda yang disajikan pada tabel 4.10, maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,177 - 0,012X_1 + 0,044X_2 + \varepsilon$$

1. Nilai konstanta (α) sebesar 0,177 menunjukkan bahwa apabila nilai variabel *capital intensity* (LAG_X1) dan *transfer pricing* (LAG_X2) bernilai nol, maka nilai *tax avoidance* (LAG_Y) perusahaan berada pada angka 0,177.
2. Koefisien β_1 sebesar -0,012 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 satuan pada *capital intensity* (LAG_X1) akan menurunkan *tax avoidance* (LAG_Y) sebesar -0,012 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.
3. Koefisien β_2 sebesar 0,044 berarti bahwa setiap kenaikan pada *transfer pricing* (LAG_X2) sebesar 1 satuan akan meningkatkan *tax avoidance* (LAG_Y)

perusahaan sebesar 0,044 satuan, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

4.2.3.3. Uji Simultan (Uji F)

Tabel 4.11 Hasil Uji Simultan (Uji F)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,007	2	,004	4,442	,016 ^b
	Residual	,046	57	,001		
	Total	,053	59			

a. Dependent Variable: LAG_Y

b. Predictors: (Constant), LAG_X2, LAG_X1

Sumber: Pengolahan Data SPSS 25, 2026

Berdasarkan hasil Uji F pada tabel 4.11 yang telah dilakukan, diperoleh nilai *mean square* pada bagian *regression* sebesar 0,004 yang menunjukkan rata-rata variasi variabel dependen (LAG_Y) yang dapat dijelaskan oleh model regresi melalui variabel independen, yaitu LAG_X1, LAG_X2, dan LAG_Z. Sementara itu, nilai *mean square* pada bagian residual sebesar 0,001 yang menunjukkan rata-rata variasi yang tidak mampu dijelaskan oleh model regresi atau merupakan kesalahan. Nilai F hitung sebesar 4,442 jika dibandingkan dengan F tabel pada tingkat signifikansi 0,05, dimana nilai F hitung sebesar 4,442 lebih besar dari F tabel 3,16. Nilai tersebut diperoleh dari tabel distribusi F dengan $df_1 = 3 - 1 = 2$ dan $df_2 = 60 - 3 = 57$ pada tingkat signifikansi 0,05. Hal ini dikarenakan F hitung lebih besar dari F tabel ($4,442 > 3,16$).

Selain itu, nilai *Sig.* sebesar 0,016 yang lebih kecil dari 0,05 ($0,016 < 0,05$) semakin memperkuat bahwa hasil pengujian signifikan secara statistik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel independen (LAG_X1 dan

LAG_X2) secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (LAG_Y). Oleh karena itu, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dinilai memenuhi kelayakan model.

4.2.3.4. Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4.12 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	,177	,009		,000
	LAG_X1	-,012	,021	-,076	,572
	LAG_X2	,044	,015	,389	,005

a. Dependent Variable: LAG_Y

Sumber: Pengolahan Data SPSS 25, 2026

Berdasarkan pada hasil pengujian tabel 4.12, berikut adalah penjelasan dari hasil uji t dengan menggunakan nilai t_{tabel} yang digunakan adalah sebesar 2,002, nilai ini diperoleh dari $df1 = 3 - 1 = 2$ dan $df2 = 60 - 3 = 57$.

1. Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Diketahui bahwa variabel X1 *capital intensity* memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,012 dengan nilai t_{hitung} sebesar -0,568 dan t_{tabel} sebesar 2,002 sehingga $(-0,568 < 2,002)$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,572 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 $(0,572 > 0,05)$, maka H_1 ditolak. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan adanya pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* ditolak.

2. Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

Pada hasil uji t yang telah dilakukan variabel *transfer pricing* memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,044 dengan nilai t_{hitung} sebesar 2,926 dan t_{tabel}

sebesar 2,002 sehingga ($2,926 > 2,002$) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,005 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,005 < 0,05$), maka H_2 diterima. Sehingga hipotesis kedua yang menyatakan adanya pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* terbukti atau dapat diterima.

4.2.4. Analisis Regresi Moderasi

4.2.4.1. Koefisien Determinasi

Berdasarkan pada tabel 4.13, diketahui bahwa nilai *R Square* sebesar 0,146. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 14,6% variabel *tax avoidance* dapat dijelaskan oleh variabel *capital intensity*, *transfer pricing* yang dimoderasi oleh *corporate governance*. Sementara itu, sisanya sebesar 85,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya, nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,067 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan variabel moderasi yang digunakan dalam model, kemampuan variabel *capital intensity*, *transfer pricing* yang dimoderasi oleh *corporate governance* dalam menjelaskan variabel *tax avoidance* adalah sebesar 6,7% sedangkan sisanya sebesar 93,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Selain itu, nilai *Std. Error of the Estimate* sebesar 0,029033 mencerminkan besarnya tingkat kesalahan prediksi dalam model regresi. Nilai ini menunjukkan rata-rata selisih antara nilai aktual dengan nilai prediksi yang dihasilkan model relatif kecil. Oleh karena itu, meskipun kemampuan penjelasan model regresi masih terbatas, sehingga tingkat kesalahan prediksi yang dihasilkan tergolong relatif kecil.

Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,382 ^a	,146	,067	,029033

a. Predictors: (Constant), X2Z, LAG_Z, LAG_X1, LAG_X2, X1Z

Sumber: Pengolahan Data SPSS 25, 2026

4.2.4.2. Uji Simultan (Uji F)

Tabel 4.14 Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,008	5	,002	1,842	,120 ^b
	Residual	,046	54	,001		
	Total	,053	59			

a. Dependent Variable: LAG_Y

b. Predictors: (Constant), X2Z, LAG_Z, LAG_X1, LAG_X2, X1Z

Sumber: Pengolahan Data SPSS 25, 2026

Berdasarkan pengujian pada tabel 4.14 yang telah dilakukan, hasil uji simultan (uji F) diperoleh nilai F hitung sebesar 1,842, sedangkan nilai F tabel sebesar 2,27 ($df_1 = 6 - 1 = 5$ dan $df_2 = 60 - 6 = 54$). Karena nilai F hitung lebih besar dibandingkan F tabel ($1,842 < 2,27$). Serta nilai signifikansi sebesar 0,120 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,120 > 0,05$), sehingga dapat diartikan bahwa secara bersama-sama atau simultan variabel independen, variabel moderasi, serta variabel interaksi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan belum mampu menjelaskan hubungan antara variabel dalam penelitian ini.

4.2.4.3. Analisis Regresi Moderasi Menggunakan MRA

90

Tabel 4.15 Hasil Analisis Regresi Moderasi

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	,174	,038		4,593
	LAG_X1	-,030	,095	-,189	,751
	LAG_X2	,039	,067	,340	,563
	LAG_Z	,003	,115	,009	,982
	X1Z	,064	,297	,142	,831
	X2Z	,021	,200	,060	,918

17

a. Dependent Variable: LAG_Y

Sumber: Pengolahan Data SPSS 25, 2026

Berdasarkan dari hasil pengujian analisis regresi moderasi yang disajikan pada tabel 4.15, maka diperoleh model persamaan analisis sebagai berikut:

$$Y = 0,174 - 0,030 \text{ LAGX1} + 0,039 \text{ LAGX2} + 0,003 \text{ LAGZ} + 0,064 \text{ X}_1\text{Z} + 0,021 \text{ X}_2\text{Z} + \varepsilon$$

32

1. Pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi.

139

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) pada model

114

Moderated Regression

Analysis (MRA) diatas, variabel interaksi X1Z memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,215

19

dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,004 ($df_1 = 6 - 1 = 5$ dan $df_2 = 60 - 6 = 54$), dimana

23

nilai t_{hitung} tersebut berada lebih kecil dari t_{tabel} ($0,215 < 2,004$). Selain itu, nilai

4

signifikansi sebesar $0,831 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel

2

moderasi (Z) belum mampu memoderasi hubungan antara *capital intensity* (X1)

dengan *corporate governance* (Z) secara signifikan. Dengan demikian, hipotesis

108

ketiga (H₃) yang menyatakan bahwa *corporate governance* mampu memoderasi

pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*, sehingga tidak terdapat efek moderasi pada hubungan tersebut. Maka H_3 dalam penelitian ini ditolak atau tidak diterima.

2. Pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi.

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) pada model *Moderated Regression Analysis* (MRA) diatas, variabel interaksi $X1Z$ memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,104 dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,004 ($df1 = 6 - 1 = 5$ dan $df2 = 60 - 6 = 54$), dimana nilai t_{hitung} tersebut berada lebih kecil dari t_{tabel} ($0,104 < 2,004$). Selain itu, nilai signifikansi sebesar $0,918 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *corporate governance* (Z) tidak mampu memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, arah hubungan ini bertentangan dengan hipotesis keempat (H_4) yang menyatakan bahwa *corporate governance* mampu memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*, sehingga tidak terdapat efek moderasi pada hubungan tersebut. Maka H_4 dalam penelitian ini ditolak.

4.3. Pembahasan Penelitian

4.3.1. Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan

Basic Materials Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Hasil regresi pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. *Capital intensity* memiliki nilai t_{hitung} sebesar -0,568 dan t_{tabel} sebesar 2,002 sehingga (-

0,568 < 2,002) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,572 > 0,05, sehingga dalam pengujian tersebut tidak mendukung hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan $capital\ intensity$ berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini disebabkan perusahaan dengan aset tetap dalam jumlah besar dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan dalam jangka panjang (Ghozali, 2021b).

Dalam perspektif *agency theory*, manajemen sebagai pihak *agent* memiliki peluang untuk melakukan tindakan oportunistik termasuk dalam penentuan kebijakan pajak seperti *tax avoidance* guna memperoleh keuntungan tertentu. Namun, pada perusahaan *Basic Materials* seperti industri pertambangan, kimia, dan manufaktur dasar sangat bergantung pada aset tetap dalam jumlah besar, sehingga kepemilikan aset tersebut lebih ditujukan untuk keberlangsungan produksi daripada sebagai sarana untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, *agency theory* belum mampu menjelaskan hubungan antara $capital\ intensity$ dan *tax avoidance* dalam penelitian ini, karena $capital\ intensity$ terbukti tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dalam perspektif teori akuntansi positif, khususnya *political cost hypothesis*, perusahaan dengan skala besar cenderung menghindari kebijakan yang dapat menarik perhatian pemerintah maupun regulator termasuk tindakan *tax avoidance*. Pada perusahaan *Basic Materials*, tingginya proporsi aset tetap cenderung berada di bawah pengawasan ketat pemerintah dan publik. Hal ini mendorong perusahaan lebih berhati-hati dalam kebijakan akuntansi dan perpajakan guna menghindari tekanan politik. Oleh karena itu, perusahaan *Basic Materials* lebih memilih patuh terhadap aturan pajak dibandingkan melakukan

praktik penghindaran pajak, sehingga *capital intensity* tidak menjadi faktor utama yang memengaruhinya. Dengan demikian, teori akuntansi positif belum mampu menjelaskan hubungan antara *capital intensity* dan *tax avoidance* dalam penelitian ini, karena *capital intensity* terbukti tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain itu, telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1 (b) yang menjelaskan bahwa biaya penyusutan harta berwujud dan biaya amortisasi atas hak atau biaya lain yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. Namun, ketentuan mengenai metode dan tarif penyusutan telah diatur secara ketat dalam peraturan perpajakan. Kondisi ini menyebabkan perusahaan memiliki keterbatasan dalam memanfaatkan penyusutan sebagai sarana untuk melakukan *tax avoidance* dan juga membatasi peluang manajemen (*agent*) untuk melakukan tindakan oportunistik dalam memanfaatkan *capital intensity* sebagai sarana praktik *tax avoidance*, sehingga konflik keagenan dalam konteks ini relatif kecil.

Pada tahun 2021-2024, perusahaan *Basic Materials* lebih mengarahkan pemanfaatan aset tetap untuk menunjang aktivitas operasional dan meningkatkan kemampuan produksi perusahaan. Pada tahun 2021, perusahaan masih mengalami proses pemulihan setelah pandemi COVID-19, sementara itu pada tahun berikutnya perusahaan dihadapkan pada kondisi ekonomi yang belum stabil, perubahan harga komoditas, dan meningkatnya kebutuhan produksi. Keadaan tersebut membuat perusahaan *Basic Materials* lebih berfokus pada menjaga kestabilan perusahaan dan kelangsungan usaha dibandingkan untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

Dengan demikian, ²³ hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh, Santo & Nastiti (2023), Firmansyah & Indrawan (2025), dan Cahyati & Darma (2023) yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap ²² *tax avoidance*. Temuan penelitian ini berhasil memperkuat bukti bahwa *capital intensity* bukan faktor utama *tax avoidance*, serta menjadi evaluasi bagi perusahaan dan pemerintah terkait penggunaan aset tetap dan efektivitas kebijakan perpajakan.

³ 4.3.2. Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Basic Materials Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

⁶ Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Hasil regresi pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa *transfer pricing* ⁸⁶ berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Nilai t_{hitung} sebesar 2,926 dan t_{tabel} sebesar 2,002 sehingga $(2,926 > 2,002)$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,005 < 0,05$, sehingga dalam pengujian tersebut mendukung hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan ¹³² *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Praktik *transfer pricing* sering dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai upaya ⁵ untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Strategi ini dilakukan dengan menetapkan harga transaksi antar perusahaan dalam satu grup di bawah harga pasar, sehingga keuntungan dapat dialihkan ¹ ke entitas yang beroperasi di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah (Wati *et al.*, 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa ⁴¹ semakin tinggi intensitas praktik *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan, maka semakin besar pula kecenderungan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*.

Dalam *agency theory* yang menyatakan bahwa manajer cenderung berupaya memaksimalkan laba atau keuntungan perusahaan guna memperoleh kompensasi yang lebih tinggi atas kinerjanya. Dalam upaya tersebut, manajer dapat mengambil berbagai keputusan strategis, termasuk kebijakan perpajakan tanpa sepenuhnya mempertimbangkan risiko dalam jangka panjang yang mungkin timbul (Wati *et al.*, 2025). Selain itu, adanya perbedaan kepentingan antara manajer dengan pihak lain. Manajer memiliki dorongan untuk meningkatkan laba karena berkaitan dengan penilaian kinerja dan imbalan yang diterima. Kondisi ini dapat mendorong sifat oportunistik, seperti memanfaatkan celah dalam regulasi melalui praktik *transfer pricing* guna menekan beban pajak. Akibatnya keputusan yang diambil lebih berorientasi pada kepentingan jangka pendek. Oleh karena itu, *agency theory* mampu menjelaskan hubungan antara *transfer pricing* dan *tax avoidance* dalam penelitian ini, karena *transfer pricing* terbukti berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Sementara itu, dalam perspektif teori akuntansi positif, khususnya hipotesis biaya politik (*political cost hypothesis*), perusahaan sektor *Basic Materials* yang umumnya memiliki skala besar dan mendapat perhatian besar dari pemerintah cenderung memilih kebijakan yang dapat meminimalkan beban pajak melalui *transfer pricing*, perusahaan dapat mengatur pelaporan laba agar lebih efisien secara pajak tanpa secara langsung melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, teori akuntansi positif mampu menjelaskan hubungan antara *transfer pricing* dan *tax avoidance* dalam penelitian ini, karena *transfer pricing* terbukti berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Fenomena pada tahun 2021-2024 menunjukkan bahwa pasca pandemi COVID-19, perusahaan *Basic Materials* masih menghadapi kondisi ekonomi yang belum stabil, peningkatan harga bahan baku, dan perubahan permintaan pasar. Situasi tersebut menyebabkan perusahaan berupaya menjaga laba dan kestabilan kinerja keuangan melalui berbagai langkah efisiensi. Salah satu strategi yang digunakan perusahaan yaitu pengelolaan pajak melalui *transfer pricing* dengan melakukan transaksi kepada pihak berelasi guna mengatur laba perusahaan agar beban pajak dapat diminimalkan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah & Indrawan (2025), Janide *et al.*, (2025), dan Budiarta & Nugraha (2025) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa *transfer pricing* menjadi salah satu strategi dalam menekan beban pajak, serta menjadi pertimbangan bagi perusahaan dan pemerintah dalam pengawasan transaksi pihak berelasi.

4.3.3. Corporate governance Dalam Memoderasi Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan *Basic Materials* Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa *corporate governance* mampu memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Hasil uji regresi moderasi dengan pendekatan uji MRA pada tabel 4.15 menunjukkan bahwa *capital intensity* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh *corporate governance* memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,215 dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,004, dimana nilai t_{hitung} tersebut berada lebih kecil dari t_{tabel} ($0,215 <$

2,004) dengan nilai⁹ signifikansi sebesar $0,831 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_3 ditolak yang mana artinya *corporate governance* bukan merupakan variabel yang dapat memoderasi *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan *corporate governance* lebih berfokus pada transparansi dan kepatuhan umum, bukan pada pengawasan spesifik terhadap strategi pajak. Selain itu, pengawas perusahaan tidak membatasi investasi aset tetap karena dianggap penting untuk operasional dan peningkatan laba, sehingga perannya terbatas pada pengawasan kepatuhan dan konflik kepentingan. Lemahnya peran moderasi *corporate governance* juga⁹⁵ dipengaruhi oleh faktor di luar model, seperti kebijakan pajak perusahaan, praktik internal, dan budaya organisasi (Andrilia & Setiyawati, 2025).

Berdasarkan *agency theory*, *capital intensity* yang tinggi dapat mencerminkan bahwa besarnya investasi perusahaan pada aset tetap, yang memberikan peluang bagi manajer untuk memanfaatkan kebijakan penyusutan dalam menekan laba kena pajak. Kondisi ini dapat mendorong meningkatnya praktik *tax avoidance* karena adanya konflik kepentingan antara pemilik dan manajer, di mana manajer cenderung bertindak oportunistik untuk mencapai kepentingannya. Namun, keberadaan *corporate governance* menjadi mekanisme pengendalian yang penting dalam mengawasi tindakan manajer. Tata kelola perusahaan yang baik dapat membatasi praktik *tax avoidance* yang berlebihan, sehingga *corporate governance* tidak mampu memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Dengan demikian, *agency theory* belum mampu

menjelaskan peran *corporate governance* dalam memoderasi hubungan antara *capital intensity* dan *tax avoidance* dalam penelitian ini, karena *corporate governance* terbukti tidak memperkuat maupun memperlemah hubungan tersebut.

Dalam teori akuntansi positif, khususnya *political cost hypothesis*, perusahaan dengan *capital intensity* yang tinggi cenderung berada di bawah pengawasan yang lebih ketat sehingga lebih berhati-hati dalam kebijakan akuntansi dan perpajakan. Oleh karena itu, investasi pada aset tetap lebih difokuskan untuk mendukung operasional dan meningkatkan kinerja perusahaan, bukan sebagai strategi dalam penghindaran pajak. Dengan demikian, teori akuntansi positif belum mampu menjelaskan peran *corporate governance* dalam memoderasi hubungan antara *capital intensity* dan *tax avoidance* dalam penelitian ini, karena *corporate governance* tidak terbukti memoderasi hubungan tersebut.

Fenomena pada tahun 2021-2024 menunjukkan bahwa perusahaan *Basic Materials* lebih memprioritaskan pemulihan kinerja perusahaan pasca pandemi COVID-19 melalui peningkatan kapasitas produksi, menjaga stabilitas operasional, dan mempertahankan keberlangsungan usaha. Dalam kondisi tersebut, investasi aset tetap lebih difokuskan untuk mendukung aktivitas operasional perusahaan daripada digunakan sebagai strategi *tax avoidance*. akibatnya, *corporate governance* belum mampu memperkuat maupun memperlemah pengaruh *capital intensity* dan *tax avoidance* karena penggunaan aset tetap perusahaan tidak berkaitan langsung dengan praktik *tax avoidance*.

Dengan demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ghozali (2021b), Wati *et al.*, (2025), dan Janide *et al.*, (2025) yang

menyatakan bahwa *corporate governance* tidak dapat memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Temuan ini menunjukkan bahwa peran pengawasan belum efektif dalam mengendalikan kebijakan terkait *capital intensity*, sehingga tidak mempengaruhi praktik *tax avoidance*. Hasil ini menjadi pertimbangan bagi perusahaan dan regulator untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, khususnya dalam kebijakan perpajakan.

4.3.4. Corporate governance Dalam Memoderasi Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Basic Materials Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa *corporate governance* mampu memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Hasil uji regresi moderasi dengan pendekatan uji MRA pada tabel 4.15 menunjukkan bahwa *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh *corporate governance* memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,104 dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,004, dimana nilai t_{hitung} berada lebih kecil dari t_{tabel} ($0,104 < 2,004$) dengan nilai signifikansi sebesar $0,918 > 0,05$, dapat disimpulkan bahwa H_4 ditolak yang mana artinya *corporate governance* bukan merupakan variabel yang dapat memoderasi *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.

Dalam *agency theory*, hal ini dikarenakan keberadaan mekanisme tata kelola perusahaan yang belum efektif dalam memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Kondisi ini dapat disebabkan oleh karakteristik praktik *transfer pricing* yang kompleks, terutama karena melibatkan transaksi dengan pihak berelasi lintas negara sehingga sulit diawasi secara menyeluruh.

Pengawasan yang dilakukan oleh *corporate governance* belum sepenuhnya berjalan optimal dalam mengurangi konflik antara *agent* dan *principal*. Manajemen (*agent*) cenderung bersifat oportunistik untuk memaksimalkan kepentingannya, termasuk melalui praktik *transfer pricing* guna melakukan praktik *tax avoidance*. Praktik ini dilakukan dengan menetapkan harga transaksi barang atau jasa di bawah harga pasar dalam satu kelompok usaha, sehingga laba dapat dialihkan ke entitas yang berada di negara dengan tarif pajak yang rendah. Dengan demikian, semakin tinggi tarif pajak di suatu negara, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* (Wati *et al.*, 2025). Oleh karena itu, *agency theory* belum mampu menjelaskan peran *corporate governance* dalam memoderasi hubungan antara *transfer pricing* dan *tax avoidance* dalam penelitian ini, karena *corporate governance* terbukti tidak memperkuat maupun memperlemah hubungan tersebut.

Selain itu, dalam teori akuntansi positif, dimana perusahaan berupaya menekan beban pajak untuk mengurangi biaya politis. Pada perusahaan *Basic Materials* yang berskala besar dan mendapat pengawasan yang tinggi oleh pemerintah, manajemen tetap memiliki insentif melakukan *transfer pricing* yang sulit dideteksi, sehingga pengawasan *corporate governance* menjadi kurang efektif dan tidak mampu memoderasi hubungan tersebut. Oleh karena itu, teori akuntansi positif belum mampu menjelaskan peran *corporate governance* dalam memoderasi hubungan antara *transfer pricing* dan *tax avoidance* dalam penelitian ini, karena *corporate governance* tidak terbukti memperkuat maupun memperlemah hubungan tersebut.

Fenomena tahun 2021-2024 memperlihatkan bahwa perusahaan *Basic Materials* masih menghadapi berbagai tekanan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Keadaan tersebut mendorong perusahaan untuk menjaga profitabilitas dan kestabilan keuangan melalui berbagai strategi efisiensi, termasuk pengelolaan pajak melalui *transfer pricing*. Oleh karena itu, keberadaan *corporate governance* belum mampu memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.

Dengan demikian, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Janide *et al.*, (2025) yang menyatakan bahwa *corporate governance* tidak dapat memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Temuan ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan belum efektif dalam mengendalikan transaksi pihak berelasi yang kompleks, sehingga menjadi pertimbangan bagi perusahaan dan regulator untuk memperkuat pengawasan serta kebijakan perpajakan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi pada perusahaan *Basic Materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2024. Berdasarkan analisis data dan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diketahui kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa H_1 *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan nilai signifikansi sebesar $0,572 > 0,05$. Hal ini disebabkan perusahaan dengan aset tetap dalam jumlah besar dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan dalam jangka panjang. Temuan penelitian ini berhasil memperkuat bukti bahwa *capital intensity* bukan faktor utama *tax avoidance*, serta menjadi evaluasi bagi perusahaan dan pemerintah terkait penggunaan aset tetap dan efektivitas kebijakan perpajakan.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa H_2 *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan nilai signifikansi sebesar $0,005 < 0,05$. Praktik *transfer pricing* sering dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai upaya untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi intensitas praktik *transfer pricing* yang dilakukan

41 perusahaan, maka semakin besar pula kecenderungan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa 47 *transfer pricing* merupakan salah satu strategi dalam menekan beban pajak, 25 serta menjadi pertimbangan bagi perusahaan dan pemerintah dalam pengawasan transaksi pihak berelasi.

- 111 3. Berdasarkan hasil uji *Moderated Regression Analysis (MRA)* menunjukkan bahwa H_3 *corporate governance* tidak dapat memoderasi pengaruh 34 *capital intensity* terhadap *tax avoidance* dengan nilai signifikansi sebesar $0,831 > 0,05$. Hal ini dikarenakan *corporate governance* lebih berfokus pada transparansi dan kepatuhan umum, bukan pada pengawasan spesifik terhadap strategi pajak. Selain itu, pengawas perusahaan tidak membatasi investasi aset tetap karena dianggap penting untuk operasional dan peningkatan laba, sehingga perannya terbatas pada pengawasan kepatuhan dan konflik kepentingan. 99 Temuan ini menunjukkan bahwa peran pengawasan belum efektif dalam mengendalikan kebijakan terkait *capital intensity*, sehingga tidak mempengaruhi 140 praktik *tax avoidance*. Hasil ini menjadi pertimbangan bagi perusahaan dan regulator untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, khususnya dalam kebijakan perpajakan.

- 2 4. Berdasarkan hasil uji *Moderated Regression Analysis (MRA)* menunjukkan 58 bahwa H_4 *corporate governance* tidak dapat memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* dengan nilai signifikansi sebesar $0,918 > 0,05$. Kondisi ini dapat disebabkan oleh karakteristik praktik *transfer pricing* yang kompleks, terutama karena melibatkan transaksi dengan pihak berelasi lintas

negara sehingga sulit diawasi secara menyeluruh. Manajemen (*agent*) cenderung bersifat oportunistik untuk memaksimalkan kepentingannya, termasuk melalui praktik *transfer pricing* guna melakukan praktik *tax avoidance*. Temuan ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan belum efektif dalam mengendalikan transaksi pihak berelasi yang kompleks, sehingga menjadi pertimbangan bagi perusahaan dan regulator untuk memperkuat pengawasan serta kebijakan perpajakan.

7 **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan kesimpulan yang telah diperoleh, penelitian ini memberikan sejumlah implikasi terkait ⁴⁹ *capital intensity*, *transfer pricing*, *tax avoidance*, dan *corporate governance*. Oleh sebab itu, ¹ disusun beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pihak terkait serta rujukan bagi peneliti selanjutnya, yakni sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Perusahaan *Basic Materials* diharapkan dapat mengoptimalkan penerapan *corporate governance* sebagai alat pengendalian yang efektif terutama dalam mengawasi praktik *transfer pricing* yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Selain itu, perusahaan perlu lebih cermat dalam transaksi dengan pihak berelasi dan pengelolaan aset tetap guna mengurangi risiko perpajakan.

2. Bagi Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Diharapkan dapat meningkatkan kualitas regulasi serta pengawasan terhadap praktik *transfer pricing* dan penerapan *corporate governance*. Penguatan transparansi dan penegakan aturan perpajakan juga diperlukan untuk

menekan praktik *tax avoidance*, khususnya pada perusahaan dengan transaksi afiliasi lintas negara.

16

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti profitabilitas, *thin capitalization*, *political connection*, *sales growth*, umur perusahaan, serta memperluas objek dan periode penelitian. Selain itu, proksi *corporate governance* dan metode analisis yang lebih beragam dapat dilakukan untuk menghasilkan temuan yang lebih komprehensif.

ORIGINALITY REPORT

41 %
SIMILARITY INDEX

36 %
INTERNET SOURCES

31 %
PUBLICATIONS

21 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UPN Veteran Yogyakarta Student Paper	6 %
2	positori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2 %
3	positori.uin-suska.ac.id Internet Source	2 %
4	positori.upstegal.ac.id Internet Source	2 %
5	positori.buddhidharma.ac.id Internet Source	1 %
6	jurnal.ylii.or.id Internet Source	1 %
7	positori.unisi.ac.id Internet Source	1 %
8	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1 %
9	positori.uinsaizu.ac.id Internet Source	1 %
10	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1 %
11	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1 %
12	lib.ibs.ac.id Internet Source	1 %
13	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	1 %
14	dirdosen.budiluhur.ac.id Internet Source	1 %
15	journal.yrpioku.com Internet Source	1 %

16	repository.unissula.ac.id Internet Source	1 %
17	Submitted to Universitas Raharja Student Paper	1 %
18	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	1 %
19	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
20	eprints.stiei-kayutangi-bjm.ac.id Internet Source	<1 %
21	eprints.mercubuana-yogya.ac.id Internet Source	<1 %
22	Annisa Azzahra, Dini Fitrianti. "Pengaruh Transfer Pricing, Ukuran Perusahaan, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Publication	<1 %
23	Gita Febrianti, Fery Citra Febriyanto. "Pengaruh Leverage, Dewan Komisaris Independen dan Intesitas Modal terhadap Agresivitas Pajak", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2025 Publication	<1 %
24	eprints2.undip.ac.id Internet Source	<1 %
25	I Ketut Gian Putra Hendriawan, Putu Pande R. Aprilyani Dewi. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Publication	<1 %
26	eprints.kwikkiangie.ac.id Internet Source	<1 %
27	I Putu Arya Darmawan, Putu Putri Prawitasari. "Moderasi Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan dalam Hubungan Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2024)", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Publication	<1 %
28	jim.unisma.ac.id Internet Source	<1 %

29	repository.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
30	jurnal.umt.ac.id Internet Source	<1 %
31	repository-feb.unpak.ac.id Internet Source	<1 %
32	repo.ugj.ac.id Internet Source	<1 %
33	edoc.site Internet Source	<1 %
34	openjournal.unpam.ac.id Internet Source	<1 %
35	Devita Mia Divia Nabila, Didik Tugas Suprianto, Alberta Esti Handayani. "ANALISIS PENGARUH LEVERAGE, CORPORATE GOVERNANCE, DAN TRANSFER PRICING TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR FOOD AND BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2021-2023", Jurnal Maneksi, 2025 Publication	<1 %
36	Fadiyah Ramadhani Putri, Erly Mulyani. "PENGARUH KEPEMILIKAN KELUARGA, LIKUIDITAS DAN LEVERAGE TERHADAP MANAJEMEN LABA", Jurnal Maneksi, 2026 Publication	<1 %
37	Submitted to Universitas Riau Student Paper	<1 %
38	eprints.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
39	Ni Wayan Lia Apriani. "Tax avoidance: Pengaruh transfer pricing, profitabilitas dan leverage di perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2025 Publication	<1 %
40	eprints.unpak.ac.id Internet Source	<1 %
41	ipm2kpe.or.id Internet Source	<1 %
42	jurnal.ubd.ac.id Internet Source	<1 %

43	Andi Chaerunnisa Ishak, Ardan Gani Asalam. "Pengaruh Koneksi Politik, Capital Intensity, dan Corporate Social Responsibility Disclosure Terhadap Tax Avoidance", Owner, 2023 Publication	<1 %
44	ejurnal.umri.ac.id Internet Source	<1 %
45	Megawati Akas, Herman Darwis, Gregorius Jeandry. "Pengaruh Laporan Keberlanjutan, Transfer Pricing, Intensitas Modal, dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional Sektor Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2021-2024", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Publication	<1 %
46	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
47	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
48	dspace.uui.ac.id Internet Source	<1 %
49	Syabrina Aprilia, Ajimat Aprilia. "Pengaruh Capital Intensity, Transfer Pricing dan Financial Distress Terhadap Penghindaran Pajak", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Publication	<1 %
50	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1 %
51	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
52	repository.usd.ac.id Internet Source	<1 %
53	Ahmad Febrian Fauzi. "Pengaruh Self-Esteem, Rejection Sensitivity Dan Avoidant Attachment Terhadap Fear Of Rejection Pada Remaja Akhir Dan Dewasa Awal (17-25 Tahun)", Jurnal Psikologi, 2026 Publication	<1 %
54	Submitted to Universitas Muhammadiyah Jember Student Paper	<1 %
55	prin.or.id Internet Source	<1 %
56	Submitted to Erciyes Üniversitesi	

<1 %

57 journal.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

<1 %

58 penerbitadm.com

Internet Source

<1 %

59 Desi Rahmawati, Dhiona Ayu Nani. "PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, DAN TINGKAT HUTANG TERHADAP TAX AVOIDANCE", Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2021

Publication

<1 %

60 repository.unhas.ac.id

Internet Source

<1 %

61 Farroqi Drajad, Khadijah Nurani. "Pengaruh Profitabilitas dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024", ARZUSIN, 2026

Publication

<1 %

62 journal.ipm2kpe.or.id

Internet Source

<1 %

63 Maya Novitasari, Srikalimah Srikalimah, Munari Munari. "Peran Profitability sebagai Moderasi: Sales Growth, Transfer Pricing, Capital Intensity dan Tax Avoidance", Owner, 2025

Publication

<1 %

64 Nur Alfi Laila Sifai Ghasani, Nurdiono Nurdiono, Yenni Agustina, A. Zubaidi Indra. "PENGARUH TRANSFER PRICING, LEVERAGE DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE", Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2021

Publication

<1 %

65 Widhi Setyowicaksono, Tri Lestari, Agus Solikhan Yulianto. "The Effect of Transfer Pricing on Tax Avoidance with Independent Commissioner Governance and Profit Management as Mediator", Indonesian Journal of Economic & Management Sciences, 2025

Publication

<1 %

66 Submitted to Universitas Nasional

Student Paper

<1 %

67 Yunita Maharani, Riswan Riswan. "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kualitas Laba Dimoderasi Manajemen Laba", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026

Publication

<1 %

68	Zainuddin Zainuddin, Muhamad Dhanutirto F. Tuwow, Anfas Anfas. "Tax Avoidance di Indonesia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya", Journal of Management and Bussines (JOMB), 2022 Publication	<1 %
69	Nur Nilam Sari, Sekar Mayangsari. "Pengaruh Thin Capitalization, Konservatisme Akuntansi Dan Financial Distress Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Moderasi", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2024 Publication	<1 %
70	Risky Putri Kurniawan, Octavia Salsabilla Jayanti. "Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia", Jurnal IAKP : Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan, 2026 Publication	<1 %
71	Submitted to Tarumanagara University Student Paper	<1 %
72	Erliyana Erliyana, Zati Rizka Fadhila. "Pengaruh tarif pajak, insentif tunneling, leverage, nilai tukar terhadap harga transfer pricing dengan mekanisme bonus sebagai variabel moderasi", Jurnal Bisnis Mahasiswa, 2026 Publication	<1 %
73	epub.imandiri.id Internet Source	<1 %
74	jurnal.pancabudi.ac.id Internet Source	<1 %
75	Agnes Caroline, Icha Fajriana. "Pengaruh Leverage, Capital Intensity, dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance", Jurnal Bisnis Mahasiswa, 2025 Publication	<1 %
76	Putry Febrianty, Fazhar Sumantri, Theysa Sahlani Pratiwi. "Pengaruh Current Ratio, Return On Assets, Dan Debt To Assets Ratio Terhadap Earnings Per Share Pada Pt Mustika Ratu Tbk Periode 2004-2024", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Publication	<1 %
77	Fahmi Adrian Wira Wicaksana, Suwarno Suwarno. "Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan", Journal of Culture Accounting and Auditing, 2024 Publication	<1 %
78	Leylitha Shobprina, Gregorius Jeandry, Sheila Kusumaningrum. "Corporate Tax Avoidance Determinants Based on Financial Ratios and Firm Size", Academia Open, 2026	<1 %

- | | | |
|----|---|------|
| 79 | Masrullah Masrullah, Mursalim Mursalim, M. Su'un. "PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMISARIS INDEPENDEN, LEVERAGE DAN SALES GROWTH TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA", SIMAK, 2018
Publication | <1 % |
| 80 | Salma Usnaini Amri, Gina Havieza Elmizan. "Pengaruh Agresivitas Pajak terhadap Nilai Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan Variabel Kontrol pada Sektor Consumer Goods yang Terdaftar di BEI Tahun 2021-2024", ARZUSIN, 2026
Publication | <1 % |
| 81 | Vivi Chairunnisa, Anton Arisman. "Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Tax Planning Perusahaan Infrastruktur BEI", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026
Publication | <1 % |
| 82 | repository.ub.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 83 | Kinanti Permata Wiharja, Sylvia Fettry Elvira Maratno. "Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Penghasilan pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026
Publication | <1 % |
| 84 | eprints.perbanas.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 85 | Aulia Kasmawati Suaib, Zainal Ruma, Nurul fadilah Aswar, Chalid imran Musa, Ilham wardhana Haeruddin. "Pengaruh Kualitas Produk, Harga dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Oppo di Makassar", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2025
Publication | <1 % |
| 86 | Ayu Fitriani, Ardiani Ika Sulistyawati. "FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA", Solusi, 2020
Publication | <1 % |
| 87 | Erlini Nurrohmah, Yenni Cahyani, Yenni Cahyani. "Pengaruh Aktivitas, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026
Publication | <1 % |
| 88 | ejournal.unitomo.ac.id
Internet Source | <1 % |

89	Internet Source	<1 %
90	Submitted to Papua University Student Paper	<1 %
91	Mei Dwi Wulandari, Herman Ernandi. "Corporate Governance Moderates Tax Avoidance Determinants in Transportation Firms", Academia Open, 2025 Publication	<1 %
92	Nadila Indah Ratnandari, Fatchan Achyani. "Implikasi Institutional Ownership Dalam Pengaruh Capital Intensity, Kompensasi Rugi Fiskal, Dan Tunneling Incentive Terhadap Tax Avoidance", Jurnal Maneksi, 2023 Publication	<1 %
93	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
94	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
95	James Tumewu, Elizabeth Caroline. "Analisis pengaruh financial distress, capital intensity, leverage, dan sales growth terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur tekstil tahun 2022 – 2024", Jurnal Bisnis Mahasiswa, 2026 Publication	<1 %
96	Ni Gusti Ayu Nila Suciadnyani, Nyoman Ari Surya Darmawan, I Gusti Ayu Purnamawati. "Peran Komisaris Independen dalam Memoderasi Thin Capitalization, Financial Distress dan Kepemilikan Asing Terhadap Agresivitas Pajak", owner, 2025 Publication	<1 %
97	Prima Sani Br Bangun, Tohap Parulian Sihombing. "Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Serta Financial Technology Terhadap Perilaku Keuangan Pada Masyarakat Di Desa Kutagaluh Kec.Tiganderket Kab.Karo", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2025 Publication	<1 %
98	jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id Internet Source	<1 %
99	Allyssa Midya Firmansyah, Rahma Wiyanti. "Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Publication	<1 %
100	ar.scribd.com Internet Source	<1 %

101	core.ac.uk Internet Source	<1 %
102	Submitted to Brookdale Community College Student Paper	<1 %
103	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
104	Submitted to undira Student Paper	<1 %
105	Didik Setiawan. "Pengaruh Capital Intensity dan Profitability terhadap Tax Avoidance", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2025 Publication	<1 %
106	Rd. Mohd. Raditya Ekaputra dan Asmaul Husna. "PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF, CAPITAL INTENSITY, DAN KEPEMILIKAN KELUARGA TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018)", Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia, 2020 Publication	<1 %
107	Alfiani Diana Fatmawati, Salman Farizi. "Analisis Opini Audit Going Concern pada Sektor Energi dan Bahan Baku: Apa Peran Politically Conected Board?", Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology, 2026 Publication	<1 %
108	Dea Mustika Kusuma Wardani, Arif Nugrahanto. "PENGARUH BOOK-TAX DIFFERENCES, ACCRUAL, DAN OPERATING CASH FLOW TERHADAP UPAYA PENGHINDARAN PAJAK", JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review), 2022 Publication	<1 %
109	Febriana Wulandari, Herman Ernandi. "Leverage and Liquidity Drive Tax Avoidance in Manufacturing Companies", Academia Open, 2025 Publication	<1 %
110	Laras Putri Maidina, Lela Nurlaela Wati. "PENGARUH KONEKSI POLITIK, GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP TAX AVOIDANCE", JURNAL AKUNTANSI, 2020 Publication	<1 %
111	Sasiska Rani, Meti Zuliyana, Venny Mayasari. "PENGHINDARAN PAJAK: LEVERAGE, TRANSFER PRICING DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI", Jurnal Riset Akuntansi Politala, 2025 Publication	<1 %
112	Abdul Wahab, Aryati Arfah, Ratna Sari. "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage, Capital Intensity, Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak	<1 %

-
- 113 Andi Sitti Syalwa Basyar, Nasrullah Nasrullah, Rahayu Japar. "Pengaruh Tingkat Imbal Hasil Terhadap Peningkatan Dana Pihak Ketiga Syariah PT Bank Sulselbar Pusat", Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 2026
Publication <1 %
-
- 114 Muhammad Iqbal, Tris Sudarto. "Pengaruh Struktur Modal, Pertumbuhan Aset, dan Arus Kas Operasi terhadap Laba Bersih dengan Implementasi Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Konstruksi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2024", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026
Publication <1 %
-
- 115 fdocuments.net
Internet Source <1 %
-
- 116 loddosinstitute.org
Internet Source <1 %
-
- 117 Yohana Septiani. "Pengaruh Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Produsen Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017)", eCo-Fin, 2021
Publication <1 %
-
- 118 Adistia Pratiwi, Urwanto. "PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KINERJA KEUANGAN DAN GREEN ACCOUNTING TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2023)", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2025
Publication <1 %
-
- 119 Imelda Pangestika, Ilham Wahyudi, Muhammad Ridwan. "Hubungan antara Transfer Pricing dan Sales Growth dengan Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2019-2023)", JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi), 2025
Publication <1 %
-
- 120 Anggi Lestari, Nela Safelia, Lutfi Lutfi. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan dan Sistem Manajemen Lingkungan terhadap Pengungkapan Emisi Karbon (Pada Perusahaan Sektor Basic Materials yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2023-2024)", Indo Green Journal, 2026
Publication <1 %
-

121	Anisa Jasni Rahmawati, Novita Indrawati, Al Azhar L, Azhari Sofyan. "PENGHINDARAN PAJAK, TRANSFER PRICING, MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE, DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA", APSSAI ACCOUNTING REVIEW, 2023 Publication	<1 %
122	Deswita Erya Kumala Sari, Alva Yenica Nandavita, Thoyibatun Nisa, Witantri Dwi Swandini. "Pengaruh Profitabilitas Terhadap Harga Saham Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2024", JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi), 2026 Publication	<1 %
123	Fara Navy Erindanindya, Nurul Mustafida. "Determinan Praktik Tax avoidance pada Perusahaan Sektor Consumer non-cyclicals yang Terdaftar di BEI", Journal of Culture Accounting and Auditing, 2024 Publication	<1 %
124	Saeed Askari Nia. "Real-Time Integration of Internal Auditing into AIS Frameworks for Monitoring Bank Balances", Springer Science and Business Media LLC, 2026 Publication	<1 %
125	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	<1 %
126	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
127	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
128	jurnal.wym.ac.id Internet Source	<1 %
129	Andrea Yunike Hadi Poernomo, Andreas Bambang D. "Pengaruh Transfer Pricing, Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Consumer Non Cyclical Tahun 2021 - 2023", JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi), 2025 Publication	<1 %
130	Anthony Holly. "VOLATILITAS ARUS KAS, TINGKAT UTANG, BOOK TAX DIFFERENCES DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERSISTENSI LABA", AJAR, 2019 Publication	<1 %
131	Ekavina Dustira Tarigan, Diana Sari. "MODERASI UKURAN PERUSAHAAN PADA PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK", Jurnal Maneksi, 2025 Publication	<1 %

132	Putri Indah Permatasari, Alberta Esti Handayani. "PENGARUH TRANSFER PRICING, THIN CAPITALIZATION, DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE PERUSAHAAN SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2021 – 2023", Jurnal Maneksi, 2025 Publication	<1 %
133	Vallerie Redyna Putri, Mira Falatifah, Lady Karlinah. "Pengaruh Profitabilitas, Firm Size dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance", Owner, 2025 Publication	<1 %
134	eprints.umsb.ac.id Internet Source	<1 %
135	journal.ilmudata.co.id Internet Source	<1 %
136	media.neliti.com Internet Source	<1 %
137	repositori.unsil.ac.id Internet Source	<1 %
138	wisuda.unissula.ac.id Internet Source	<1 %
139	Andri Pratama, Wuryaningsih. "DETERMINAN PENGUNGKAPAN TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR PERINDUSTRIAN MAKANAN DAN MINUMAN TAHUN 2020-2023", Jurnal Akunida, 2025 Publication	<1 %
140	Cindy Laurensia, Haryono Haryono, Ira Grania Mustika. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Dengan Moderasi Gender Diversity", JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi), 2024 Publication	<1 %
141	Hebenheiser Buntu, Lintje Kalangi, Stanley Kho Walandouw. "Pengaruh transfer pricing terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023", Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi, 2025 Publication	<1 %
142	Imelda De Lavega, Willy Nofranita. "Apakah Pajak Masih Menjadi Determinan Utama? Peran Corporate Governance dan Mekanisme Bonus dalam Keputusan Transfer Pricing di Indonesia", Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Pendidikan, 2026 Publication	<1 %
143	Muhammad Rinaldi, Novita Weningtyas Respati, Fatimah Fatimah. "PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, POLITICAL CONNECTION, CAPITAL	<1 %

INTENSITY DAN INVENTORY INTENSITY TERHADAP TAX AGGRESSIVENESS", SIMAK, 2020

Publication

-
- | | | |
|-------|--|------|
| 144 | Nasywa Thania, Abdillah Arif Nasution, Adi Syah Putra, Dio Agung Herubawa. "Pengaruh Big 4 Auditor Utilization, Audit Committee, dan Capital Intensity terhadap Tax Aggressiveness", ARZUSIN, 2026 | <1 % |
| <hr/> | | |
| 145 | Nurul Hidayah. "Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak melalui Tata Kelola Perusahaan sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek In", Innovative Technologica: Methodical Research Journal, 2024 | <1 % |
| <hr/> | | |
| 146 | Malinda Aliffiyah Akbar Imron, Ngurah Pandji Mertha Agung Durya, Enny Susilowati Mardjono, Entot Suhartono. "Pengaruh Transfer pricing, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak", JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi), 2025 | <1 % |
| <hr/> | | |
| 147 | Michael Widhiyanto, Suryani, Irsan Lubis. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kualitas Audit, dan Intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance", JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, 2026 | <1 % |
| <hr/> | | |
| 148 | Muhammad Al Hafid, Fitra Dharma. "Pengaruh Karakter Eksekutif, Capital Intensity dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Healthcare yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2024", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 | <1 % |
| <hr/> | | |
| 149 | Viena Halim, Yohanes. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAX AVOIDANCE SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19", Jurnal Akuntansi, 2022 | <1 % |
| <hr/> | | |
| 150 | journal.univpancasila.ac.id | <1 % |
| <hr/> | | |
| 151 | www.repository.trisakti.ac.id | <1 % |
-

Exclude quotes

On

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

On